

"Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju dan Sejahtera"

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBAWA 2025-2029

Prepared By :



Pemerintah Kabupaten Sumbawa
Dinas Kelautan dan Perikanan
2025





BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 102 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan dokumen rencana pembangunan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 730);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan pilihan bidang kelautan dan perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
10. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra-PD.
11. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra-PD.
12. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra-PD.
13. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
14. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
15. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra-PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan:
 - a. visi, misi dan program Bupati dan Wakil terpilih; dan
 - b. Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan program Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan, disertai dengan kerangka pendanaan.

- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 serta memperhatikan:
 - a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
 - b. Isu Strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, serta Renstra K/L Tahun 2025-2029.

Pasal 3

- (1) Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyusunan Renja-PD, serta dokumen perencanaan terkait lainnya.
- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, serta pagu indikatif anggaran dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra-PD meliputi:
 - BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - BAB IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - BAB V : Penutup.
- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERUBAHAN RENSTRA-PD

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra-PD dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap RPJMD.
- (2) Perubahan Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

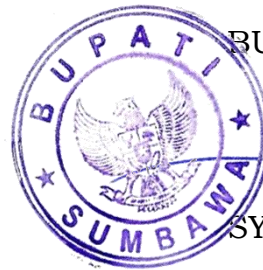
Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal 30 Oktober 2025



BUPATI SUMBAWA,

SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa
pada tanggal 31 Oktober 2025

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR 102

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 102 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN
2025-2029.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

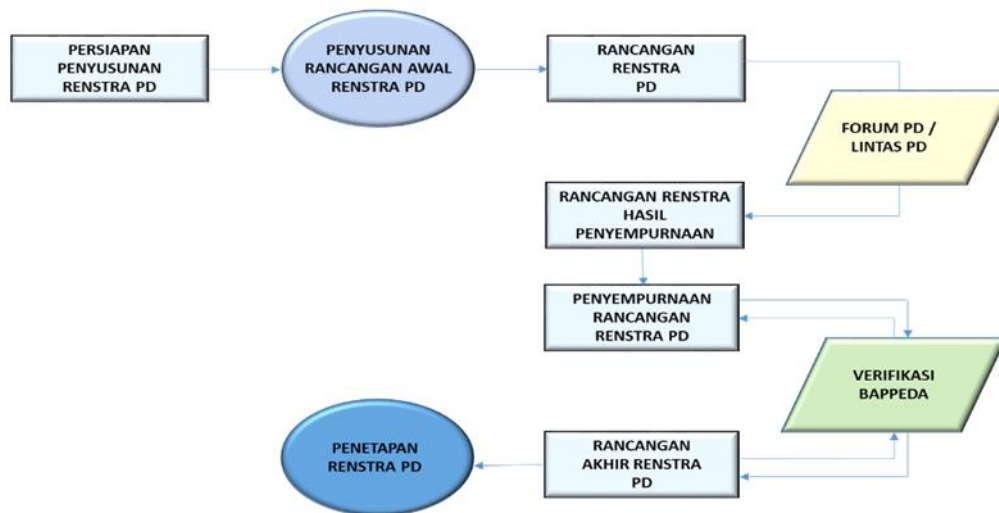
Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025.

Karakteristik dari penerapan pendekatan ini menuntut Pemerintah Daerah fokus pada kinerja terukur dari program kerja sampai dengan detail aktivitas dengan mempertimbangkan asas efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang telah diklasifikasikan sampai dengan sub kegiatan ditujukan untuk mempermudah *stakeholders* dalam melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator dan target yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, memiliki batas waktu pencapaian, dan secara terus-menerus ditingkatkan. Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka mencapai tujuan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dimaksud, perlu disusun pedoman Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bagi Pemerintah Daerah secara elektronik dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi secara langsung dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik Pemerintah Daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Dokumen Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa disusun berdasarkan pada analisis lingkungan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditentukan serta isu-isu strategis sektor kelautan dan perikanan yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 serta Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2025-2029. Ruang lingkup Renstra Kelautan dan Perikanan ini mencakup aspek pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan Kabupaten Sumbawa, yang mencakup pengelolaan, pemanfaatan, penguasaan, pemeliharaan dan pengawasan atau pengendalian serta penguatan hilirisasi sumberdaya kelautan dan perikanan menuju terwujudnya pengelolaan perikanan dan kelautan yang berdaya saing tinggi, memiliki nilai komparatif,

dan penuh kreativitas, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan *income* masyarakat nelayan (secara umum) untuk Kabupaten Sumbawa unggul, maju dan sejahtera. Isu-isu strategis dipetakan untuk menentukan alternatif-alternatif strategi ke depan. Dokumen Renstra ini dilengkapi dengan indikator kinerja beserta pendanaannya tiap tahun sehingga akuntabilitas pelaksanaan beserta pengorganisasinya dapat dievaluasi selama periode 2025-2029.

Proses penyusunan renstra perangkat daerah dapat digambarkan sebagaimana bagan berikut:



Gambar 1.1. Proses Penyusunan renstra perangkat daerah

Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025–2029 dalam penyusunannya mengacu pada RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 dan memperhatikan RPJMN, RPJPD Kabupaten Sumbawa dan RPJMD Provinsi NTB untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi dan keselarasan terhadap seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah dan nasional

1.2. Landasan Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa 2025 – 2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan;
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 30 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa;
12. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 adalah sebagai acuan bagi seluruh komponen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa dan *stakeholders* lainnya dalam mewujudkan cita-cita organisasi, sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan dapat bersinergi dan terpadu.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun ke depan,
2. Teridentifikasinya program/kegiatan/sub kegiatan dan indikator kinerjanya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,
3. Tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahunan,
4. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa,
5. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan dengan Rencana Strategis Provinsi serta Rencana Strategis Kementerian, dan
6. Tersusunnya dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa baik tahunan maupun 5 (lima) tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini terdiri dari 4 (empat) subbab yaitu: (1) Latar Belakang, menguraikan argumentasi dengan penekanan kepada aspek strategis penyusunan Renstra Tahun 2025-2029, gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Tahun 2025-2029 beserta definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra; (2) Dasar Hukum, yang mengidentifikasi regulasi yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Tahun 2025-2029; (3) Maksud dan Tujuan, menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029; (4) Sistematika Penyusunan, menjelaskan susunan sistematis penulisan dan uraian singkat masing-masing bab dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab II ini terdiri dari gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa, yang diuraikan secara rinci dalam 2 (dua) subbab sebagai berikut:

A. Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah

Pada subbab ini disajikan data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, serta hasil evaluasi capaian pelaksanaannya dalam 5 (lima) tahun terakhir. Konten pokok pada subbab ini memuat tinjauan perangkat daerah meliputi: (1) Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah; (2) Sumber Daya Perangkat Daerah; (3) Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci dan kinerja lainnya); (4) Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah; (5) Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan; (6) Kerja sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah.

B. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada subbab ini menguraikan identifikasi permasalahan yang dirumuskan serta menguraikan identifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa baik secara langsung ataupun tidak langsung.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab III terdiri dari tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 berdasarkan NSPK dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029. Selain itu, pada Bab ini juga disajikan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, termasuk penahapan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab IV ini memuat uraian program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil cascading dari tujuan, sasaran, *output* dan *outcome* yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif masing-masing. Pada Bab ini juga disajikan uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Pada Bab V terdiri dari kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi terhadap perancangan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan bidang kelautan dan Perikanan.

Tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa diatur dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa. Adapun tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa sebagai berikut:

- 1. Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan pilihan bidang kelautan dan perikanan.
- 2. Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut: (a) Perumusan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan; (b) Pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan; (c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan; serta (d) Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang kelautan dan perikanan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa dibantu oleh 5 (lima) Unit Eselon III yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sebagai berikut:

- 1. Sekretaris selaku unsur pembantu pimpinan;
- 2. Terdapat 4 (Empat) Kepala Bidang teknis selaku unsur pelaksana yaitu:
 - a. Kepala Bidang Perikanan Tangkap
 - b. Kepala Bidang Perikanan Budidaya
 - c. Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan
 - d. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Uraian tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa disajikan pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
1	Kepala Dinas	a. Menyusun perencanaan di bidang kelautan dan perikanan; b. Memvalidasi bahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan; c. Mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program	a. Perumusan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		dan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan; d. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan; e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan; f. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dan pengawasan sumber daya perikanan serta pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas; g. Melaksanakan administrasi/ penatausahaan dinas; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	kelautan dan perikanan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan; d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kelautan dan perikanan; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2	Sekretaris	a. Merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; b. Mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; c. Menganalisis bahan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaporan; d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas; e. Mengumpulkan bahan-bahan dan melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan dinas f. Mengompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja; g. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja; h. Menyusun laporan kinerja instansi pemerintah dinas, indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja dinas, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dinas dan laporan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dinas; i. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung; j. Melaksanakan kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara; k. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi; l. melaksanakan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;	a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan; b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian; c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat; d. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		m. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; n. Melaksanakan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja, laporan prognosis realisasi keuangan, laporan keuangan semesteran, dan laporan keuangan akhir tahun; o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; dan p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	
3	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	a. Bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan nelayan, pengelolaan tempat pelelangan ikan, dan usaha penangkapan ikan; b. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan teknis di bidang pemberdayaan nelayan, pengelolaan tempat pelelangan ikan, dan usaha penangkapan ikan; c. Melaksanakan identifikasi, verifikasi, dan registrasi kelompok usaha bersama; d. Melaksanakan identifikasi kebutuhan kegiatan bimbingan teknis dan diklat nelayan; e. Melaksanakan pembinaan kelembagaan nelayan kecil dan pengembangan kapasitas nelayan kecil; f. Melaksanakan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, dan kemitraan usaha; g. Melaksanakan koordinasi penyuluhan di bidang perikanan tangkap; h. Menyiapkan bahan dan metode penyuluhan perikanan tangkap; i. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan nelayan; j. Melaksanakan identifikasi sarana dan prasarana pokok, fungsional dan penunjang tempat pelelangan ikan; k. Menyusun dan menganalisis rencana pembangunan dan pengembangan tempat pelelangan ikan; l. Menyusun petunjuk pelaksanaan /petunjuk teknis pengelolaan tempat pelelangan ikan; m. Melaksanakan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan; n. Melaksanakan fasilitasi kerja sama pengelolaan tempat pelelangan ikan;	a. Penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan nelayan, pengelolaan tempat pelelangan ikan, dan usaha penangkapan ikan; b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan nelayan, pengelolaan tempat pelelangan ikan, dan usaha penangkapan ikan; dan c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		o. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan tempat pelelangan ikan; p. Melaksanakan analisis dan menyusun daftar rencana kebutuhan pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan; q. Melaksanakan identifikasi dan pemanfaatan sarana perikanan tangkap di pelabuhan perikanan; r. Merancang, merumuskan dan mengkaji ulang bahan konsep norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang usaha penangkapan ikan; s. Menyusun petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penyediaan/ pembangunan kapal ikan, sarana penangkapan ikan, penggunaan alat bantu dan standardisasi dan rekayasa teknologi penangkapan ikan; t. Menyusun data dan informasi sumber daya ikan dan statistik perikanan tangkap; u. Menyusun rencana kebutuhan kapal dan alat penangkapan ikan; v. Melaksanakan identifikasi dan analisa produktivitas kapal perikanan dan alat penangkapan ikan; w. Melaksanakan kegiatan penyediaan sumber daya ikan di perairan umum; x. Melaksanakan kegiatan penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai 10 GT dan penerbitan ijin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan ukuran sampai dengan 10 GT y. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan nelayan, pengelolaan tempat pelelangan ikan, dan usaha penangkapan ikan; dan z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	
4	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya; b. Memverifikasi dan mengoordinasikan bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan usaha perikanan budidaya, pemberdayaan pembudidaya ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan; c. Mempromosikan, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan usaha perikanan budidaya, pemberdayaan pembudidaya ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan; d. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan pembudidayaan ikan dan lingkungan	a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan usaha perikanan budidaya, pemberdayaan pembudidaya ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan; b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		seperti pengelolaan air dan lahan, kesehatan ikan dan lingkungan, pakan ikan dan obat-obatan, cara pembenihan ikan yang baik, cara budidaya ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, induk ikan, dan pelestarian induk, calon induk dan benih ikan serta pengembangan dan fasilitasi usaha melalui bantuan kemitraan usaha, akses permodalan, pendidikan dan pelatihan kelompok perikanan budidaya; e. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pemberdayaan pembudidaya ikan, pelayanan usaha perikanan budidaya, pengelolaan pembudidayaan ikan dan lingkungan serta kegiatan pendidikan dan pelatihan, kemitraan usaha dan kelembagaan; f. Menyiapkan bahan kebijakan fasilitasi pengembangan kapasitas dan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan; g. Melaksanakan pembinaan dan penertiban usaha perikanan budidaya; h. Menyiapkan data dan informasi ijin usaha perikanan dan tanda daftar pembudidayaan ikan kecil serta data dan informasi pembudidaya ikan kecil; i. Melaksanakan fasilitasi usaha budidaya perikanan lintas daerah, penggunaan pakan dan obat-obatan dan kegiatan cara pembenihan ikan yang baik dan cara budidaya ikan yang baik; j. Melaksanakan fasilitasi dan pendampingan terhadap pelaku usaha budidaya untuk pengembangan investasi serta fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan kemampuan teknis pelaku usaha kecil pembudidayaan ikan; k. Melaksanakan fasilitasi kemitraan dan akses permodalan usaha kecil pembudidayaan ikan; l. Melaksanakan fasilitasi pengendalian kualitas perairan budidaya secara berkelanjutan; m. Melaksanakan statistik perikanan budidaya; n. Melaksanakan penerbitan surat keterangan asal benih usaha budidaya;	pelaporan di bidang pelayanan usaha perikanan budidaya, pemberdayaan pembudidaya ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan; dan c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

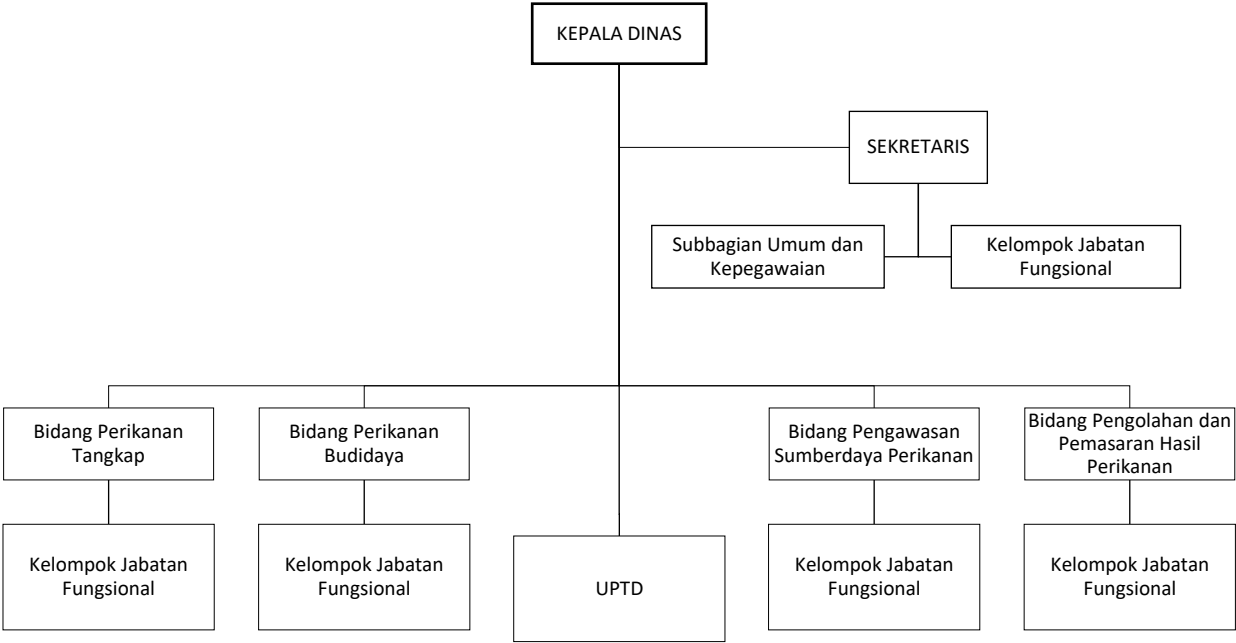
No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		o. Menyiapkan bahan dan informasi dalam rangka investasi usaha budidaya; p. Menyiapkan bahan rekomendasi teknis bagi perizinan usaha budidaya dan bagi pemanfaatan bahan bakar minyak bersubsidi; q. Melaksanakan identifikasi dan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pembudidayaan ikan; r. Melaksanakan pendampingan usaha kecil pembudidayaan ikan dan kegiatan bimbingan teknis usaha kecil pembudidayaan ikan; s. Melaksanakan kegiatan penyediaan benih ikan, calon induk, induk ikan yang berkualitas dan kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, pengendalian hama dan penyakit ikan; t. Memberikan dukungan dalam perekayasaan teknologi maupun penerapan teknologi dalam usaha budidaya perikanan; u. Menyiapkan dukungan sarana dan prasarana bagi pembudidaya ikan, upt, dan tambak percontohan; v. Melaksanakan koordinasi dan menjalin kerja sama kemitraan dalam usaha perikanan budidaya; w. Melaksanakan identifikasi dan pendataan kelompok pembudidaya ikan dan usaha budidaya perikanan; x. Melaksanakan pembinaan terhadap kelompok pembudidaya ikan dan pengembangan usaha pembudidayaan perikanan; y. Menyusun kebutuhan, distribusi dan informasi perbenihan perikanan budidaya; z. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian penggunaan pakan ikan dan obat-obatan; aa. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan usaha perikanan budidaya, pemberdayaan pembudidaya ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan; dan bb. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
5	Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Perikanan	a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan sumber daya perikanan; b. Memverifikasi dan mengoordinasikan bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan usaha perikanan tangkap dan pengawasan usaha perikanan budidaya; c. Mempromosikan, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengawasan usaha perikanan tangkap dan pengawasan usaha perikanan budidaya; d. Melaksanakan pengawasan sumber daya perikanan tangkap, investasi perikanan tangkap dan sumber daya perikanan budidaya; e. Menyiapkan bahan, informasi, dan kajian dalam pengawasan sumber daya perikanan tangkap dan sumber daya perikanan budidaya; f. Melaksanakan inventarisasi sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap; g. Menyiapkan bahan rekomendasi teknis pengawasan sumber daya perikanan tangkap dan perikanan budidaya; h. Menyusun dan menata regulasi tentang pengawasan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap; i. Melaksanakan pengawasan investasi perikanan budidaya; j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengawasan usaha perikanan tangkap dan pengawasan usaha perikanan budidaya; dan k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan usaha perikanan tangkap dan pengawasan usaha perikanan budidaya; b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan usaha perikanan tangkap dan pengawasan usaha perikanan budidaya; c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; b. Memverifikasi dan mengoordinasikan bahan kebijakan teknis di bidang bina mutu produk perikanan, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan analisa pasar dan promosi produk perikanan; c. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang mutu produk perikanan,	a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina mutu produk perikanan, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan analisa pasar dan promosi produk perikanan;

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan analisa pasar dan promosi produk perikanan; d. Melaksanakan kegiatan pembinaan mutu, diversifikasi dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil; e. Melaksanakan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil; f. Melaksanakan bimbingan teknis penerapan teknologi dalam penanganan, pengolahan dan pengembangan hasil kelautan dan perikanan; g. Memfasilitasi kegiatan pengembangan sumber daya manusia di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; h. Memfasilitasi kelembagaan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; i. Melaksanakan analisis bimbingan usaha dan permodalan bagi kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; j. Melaksanakan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan; k. Melaksanakan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan; l. Melaksanakan pemberian fasilitas sarana dan prasarana bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil; m. Melaksanakan kegiatan promosi gemar makan ikan dalam rangka mendorong peningkatan konsumsi ikan; n. Melaksanakan kegiatan pemetaan informasi, jaringan distribusi, tata kelola dan infrastruktur sistem logistik ikan; o. Melaksanakan penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil; p. Melaksanakan penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan; q. Melaksanakan kegiatan promosi usaha perikanan;	b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina mutu produk perikanan, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan analisa pasar dan promosi produk perikanan; c. Evaluasi dan pelaporan di bidang bina mutu produk perikanan, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan analisa pasar dan promosi produk perikanan; dan ; d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
		r. Menyusun data statistik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; s. Menyusun informasi harga pasar produk perikanan; t. Melaksanakan proses penerbitan surat keterangan pengiriman hasil perikanan; u. Melaksanakan kegiatan analisis akses pasar dan peningkatan kapasitas pasar usaha kelautan dan perikanan; v. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang mutu produk perikanan, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan analisa pasar dan promosi produk perikanan; dan w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	

Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa disajikan pada Gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa mengacu pada Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 91 Tahun 2020, tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari:

- 1. UPT Kelas A terdiri atas:
 - a. Unsur pimpinan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis;

- b. Unsur pembantu pimpinan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

2. UPT Kelas B terdiri atas:

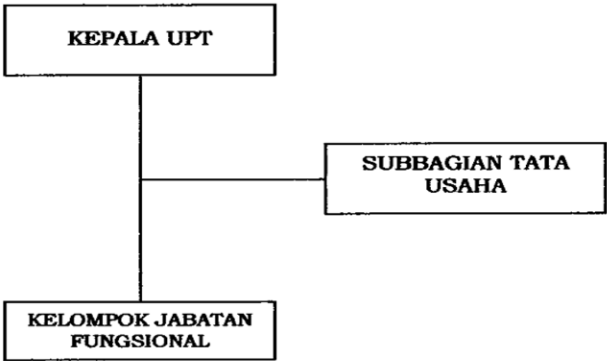
- a. Unsur pimpinan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- b. Unsur pembantu pimpinan adalah jabatan pelaksana.

Tabel 2.2. Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sumbawa

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
1.	Kepala UPT Pusat Informasi Sumberdaya Kelautan	melaksanakan penyebarluasan informasi pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai wilayah kerjanya	a. penyusunan rencana kerja UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penyebarluasan informasi pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai wilayah kerjanya; c. penyusunan perencanaan teknis operasional kegiatan penyebarluasan informasi pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan; dan d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi sumber daya kelautan dan perikanan sesuai wilayah kerjanya. e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.	Kepala UPT Balai Benih Ikan Air Tawar	Melaksanakan pengembangan kegiatan perbenihan ikan air tawar	a. Penyusunan rencana kerja UPT Balai Budidaya Ikan Air Tawar; b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan perbenihan ikan air tawar; c. penyusunan perencanaan teknis operasional kegiatan pengembangan perbenihan ikan air tawar; dan d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan perbenihan ikan air tawar.; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3.	Kepala UPT Balai Benih Ikan	melaksanakan pengembangan kegiatan perbenihan ikan pantai	a. Penyusunan rencana kerja UPT Balai Benih Ikan; b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan perbenihan ikan pantai; c. penyusunan perencanaan teknis operasional kegiatan pengembangan perbenihan ikan pantai; dan

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
			d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan perbenihan ikan pantai; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
4.	Kepala UPT Tempat Pelelangan Ikan	melaksanakan pengembangan tempat pelelangan ikan	a. Penyusunan program kerja UPT Tempat Pelelangan Ikan; b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan tempat pelelangan ikan; c. Penyusunan perencanaan teknis operasional kegiatan pengembangan tempat pelelangan ikan; d. Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengembangan tempat pelelangan ikan; e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan tempat pelelangan ikan; f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5.	Sub Bagian Tata Usaha UPT	menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan	a. penyusunan rencana kerja UPT; b. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT.

I. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KELAS A



Gambar 2.2 Struktur Organisasi UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tipe A

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.1.2 Sumberdaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam mengemban tugas dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa ditunjang oleh sumber daya manusia yang tersebar di unit kerja yang ada. Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Kelautan dan perikanan terdiri dari pegawai ASN dan pegawai Non-ASN. Karakteristik pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa disajikan pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3. Karakteristik Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024

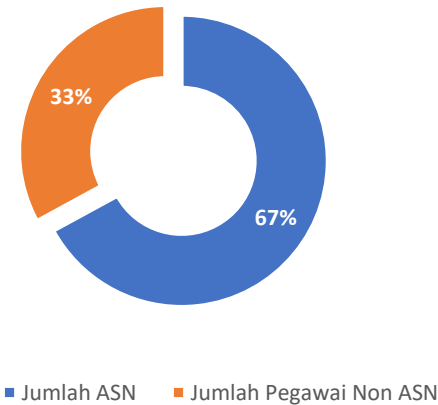
No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pegawai	82	84	84	86	86
	ASN	56	56	55	58	58
	Non ASN	26	28	29	28	28
3	Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin:					
	Laki-Laki	38	38	38	40	38
	Perempuan	18	18	17	18	20
4	Jumlah Non-ASN Berdasarkan Jenis Kelamin:					
	Laki-Laki	18	18	19	18	18
	Perempuan	8	10	10	10	10
5	Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Umur:					
	< 25 tahun	-	1	1	-	-
	26 - 35 Tahun	1	2	2	4	4
	36 - 45 Tahun	27	28	28	17	17
	46 - 55 Tahun	25	23	23	33	33
	> 55 Tahun	3	2	1	4	4
6	Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Pendidikan:					
	SMP Sederajat	2	2	2	2	2
	SMA Sederajat	14	14	14	9	11
	Diploma (D1-D3)	2	2	2	2	2
	S1 / D IV	35	34	33	39	38
	S2	3	4	4	6	5
7	Jumlah Pegawai No-ASN Berdasarkan Pendidikan:					
	SD	2	2	1	1	1
	SMP Sederajat	3	3	2	2	2
	SMA Sederajat	6	8	7	7	7
	Diploma (D1-D3)	3	1	2	2	2

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	S1 / D IV	12	14	17	16	16

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

Jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020-2024) tidak mengalami perubahan yang signifikan, yaitu berkisar 82 – 86 orang pegawai naik ASN maupun non ASN setiap tahunnya. Rata-rata komposisi pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa tahun 2020 – 2024 terdiri atas pegawai ASN sebanyak 67% dan pegawai Non ASN sebanya 33%. Keberadaan pegawai Non ASN di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sumbawa menambah fleksibilitas, dalam mendukung pelaksanaan tugas serta meningkatkan kinerja organisasi. Proporsi Pegawai ASN dan Non ASN Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dilihat dalam Gambar 2.3 berikut ini:

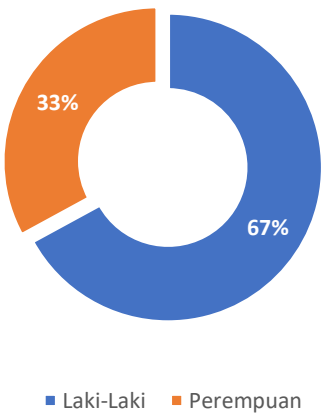
Rata - rata Porporosi Pegawai ASN dan Non ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024



Gambar 2.3 Rata-rata Proporsi Pegawai ASN dan Non ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. SumbawaTahun 2020-2024

Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan bahwa selama tahun 2020-2024 proporsi pegawai laki-laki lebih besar dari pegawai perempuan. Rata – rata disajikan pada gambar 2.4 berikut.

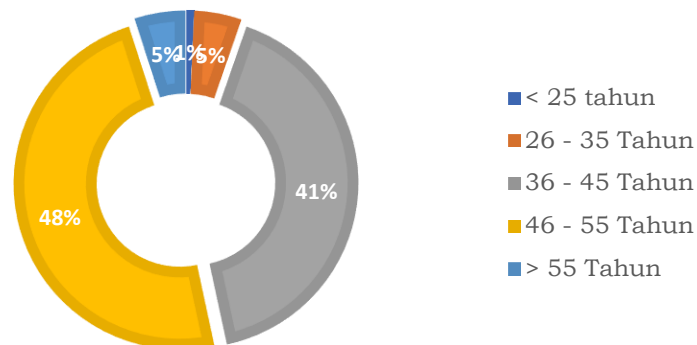
Rata-rata Proporsi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020 - 2024



Gambar 2.4 Komposisi Pegawai ASN dan Non-ASN pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbawa Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024

Berdasarkan kelompok Usia sumber daya manusia (SDM) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa tahun didominasi kelompok usia 46 – 55 tahun (45%), dan kelompok usia 36 – 45 tahun (41%). Dari data ini SDM Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa kelompok usia 46 – 55 tahun (57%) dapat dikategorikan sebagai pegawai pengalaman tinggi, menjelang masa pensiun, menduduki jabatan pengambil kebijakan atau pengawas. Sedangkan kelompok usia 36 – 45 tahun (29%) di kategorikan sebagai pegawai dengan puncak masa produktif. Komposisi usia tenaga kerja yang didominasi oleh kelompok usia 46–55 tahun mengindikasikan perlunya strategi regenerasi yang cepat dan terstruktur. Kelompok usia 36–45 tahun harus diposisikan sebagai generasi pelanjut, sementara langkah rekrutmen dan penguatan tenaga kerja usia muda perlu segera dirancang. Hal ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik dan efektivitas organisasi dalam jangka panjang. Rata-rata komposisi pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa berdasarkan usia disajikan pada gambar 2.5. dibawah ini

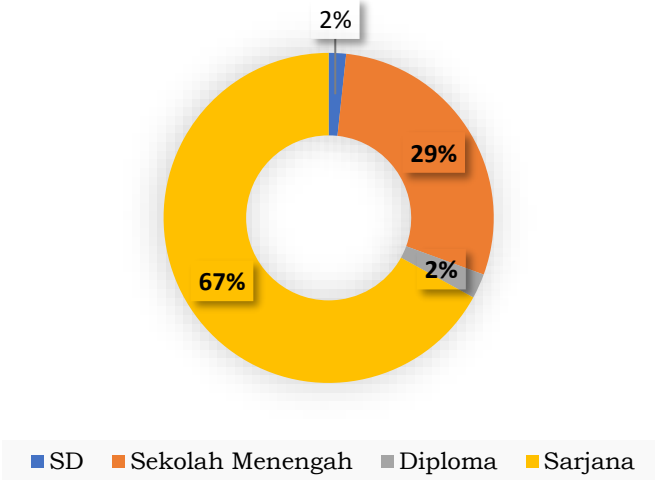
RATA-RATA KOMPOSISI PEGAWAI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN BERDASARKAN USIA TAHUN 2020 - 2024



Gambar 2.5 Rata-rata Komposisi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Kelompok Usia

Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa tahun 2020-2024 didominasi pegawai berpendidikan Sarjana baik itu ASN maupun non ASN dengan persentase sebesar 67% . Hal ini menunjukkan kesiapan organisasi dalam menghadapi tugas-tugas fungsional dan struktural. Namun, upaya peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan lanjut dan pelatihan teknis tetap diperlukan, terutama bagi ASN dengan tingkat pendidikan menengah dan vokasi. Dengan demikian, kualitas birokrasi dapat terus ditingkatkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan global. Rata - rata Komposisi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar 2.6 dibawah ini:

Rata - rata Komposisi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2020-2024



Gambar 2.6 Rata - rata komposisi pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2020-2024

Untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi serta profesionalisme sumberdaya manusia aparatur yang memadai, penentuan kebutuhan pegawai harus berdasarkan beban kerja beban kerja. Analisis beban kerja Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4 Analisis beban kerja Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Jabatan	Pemangku Jabatan			ABK	Kelebihan /Kekurangan
		ASN	Non ASN	Jumlah		
I	STRUKTURAL	23	0	23	31	-8
1	Kepala dinas	1	0	1	1	0
2	Sekretaris	1	0	1	1	0
3	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	1	0	1	1	0
4	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	1	0	1	1	0
5	Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Perikanan	1	0	1	1	0
6	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1	0	1	1	0
7	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	1	0	1	1	0
8	Kepala UPTD	11	0	11	12	-1
9	Kepala Tata Usaha (UPT)	5	0	5	12	-7
II	JABATAN FUNGSIONAL	17	0	17	63	-46
1	JF Perencana	0	0	0	3	-3
2	JF Analis Kebijakan	0	0	0	3	-3
3	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah	1	0	1	3	-2
4	JF Arsiparis	0	0	0	3	-3
5	JF Pranata Komputer	0	0	0	3	-3
6	JF Pranata SDM Aparatur	0	0	0	3	-3
7	JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	3	0	3	9	-6
8	JF Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir	1	0	1	1	0
9	JF Analis Akuakultur	4	0	4	9	-5
10	JF Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	1	0	1	1	0
11	JF Pengawas Perikanan	2	0	2	13	-11
12	JF Analis Pasar Hasil Perikanan	2	0	2	5	-3

No.	Jabatan	Pemangku Jabatan			ABK	Kelebihan /Kekurangan
		ASN	Non ASN	Jumlah		
13	JF Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	3	0	3	7	-4
III	PELAKSANA	18	28	46	133	-87
1	Operator Layanan Operasional	5	7	12	27	-15
2	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	2	0	2	21	-19
3	Penata Layanan Operasional	0	17	17	17	0
4	Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan	0	0	0	2	-2
5	Penelaah Teknis Kebijakan	3	0	3	5	-2
6	Pengadministrasi Perkantoran	5	0	5	28	-23
7	Pengelola Layanan Operasional	0	1	1	1	0
8	Pengelola Umum Operasional	0	3	3	3	0
9	Pengolah Data dan Informasi	3	0	3	29	-26
	TOTAL	58	28	86	227	-141

Sumber: Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan data Analisis Beban kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, terdapat kekurangan pegawai sebesar 64,11% yang terdiri dari pada Jabatan Struktural sebesar 3,52%, Jabatan Fungsional sebesar 20,26% dan Jabatan Pelaksana sebesar 33,38%. Dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai yang tersedia saat ini belum mencukupi untuk menjalankan seluruh tugas dan fungsi organisasi secara optimal. sehingga diperlukan upaya penambahan pegawai atau penguatan kapasitas yang ada untuk memastikan pelayanan publik dapat tetap berjalan secara optimal.

2.1.2.2 Sumber Daya Sarana Prasarana Perangkat Daerah

Sarana dan prasarana dinas mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting untuk mendukung aktivitas pelayanan umum kepada masyarakat. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa telah memiliki sarana yang cukup memadai untuk mendukung aktivitas tersebut. Sarana tersebut meliputi sarana komunikasi, transportasi, sarana kerja aparatur.

A. Inventaris Tanah

Berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, daftar inventaris tanah dari tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5 Daftar Inventaris Tanah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024

No	Jenis/Nama Barang	Satuan	Jumlah BMD Pada Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Bidang Tanah	Bidang	28	28	28	28	28
2	Luas Bidang Tanah	M2	147.004	147.004	147.004	147.004	147.004

Secara rinci inventaris tanah yang berada di bawah penguasaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) disajikan pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6 Daftar Inventaris Tanah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024

No	Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun	Lokasi/Letak	Status	Penggu-naan	Asal Usul
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	691,00	2012	Desa Empang	Hak Pakai		Pembelian
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	2.350,00	2012	Tlk. Santong Kec. Plampang	Hak Pakai		Pembelian
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	320,00	2012	Lab. Ijuk	Hak Pakai		Pembelian
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.200,00	2012	Kel. Pekat Sumbawa Besar	Hak Pakai	Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sumbawa	Pembelian
5	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	480,00	2012	Lab. Terata Kec. Lape			Pembelian
6	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	480,00	2012	Lab. Jontal Tlk Santong	Hak Pakai		Pembelian
7	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	473,00	2012	Aipaya Lab. Aji Tarano	Hak Pakai		Pembelian
8	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	48,00	2012	Lab. Jambu Kec Tarano	Hak Pakai		Pembelian
9	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	1.294,00	2012	Lab. Mapin Alas Barat	Hak Pakai		Pembelian
10	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	144,00	2012	Lab. Jambu Tarano	Hak Pakai		Pembelian
11	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	660,00	2012	Teluk Santong Plampang	Hak Pakai		Pembelian
12	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	400,00	2012	Lunyuk Rea	Hak Pakai		Pembelian
13	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	8.470,00	2012	Lab. Mapin Alas Barat	Hak Pakai		Pembelian
14	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	159,00	2012	Lab. Sumbawa	Hak Pakai		Pembelian
15	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	300,00	2012	aipaya, Lab. Aji Kec. Tarano	Hak Pakai		Pembelian
16	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	5.000,00	2012	Lekong, Alas Barat		Dialihkan ke BP4K	Pembelian
17	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	400,00	2012	Empang Atas	Hak Pakai		Pembelian
18	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Komunikasi	105,00	2012	Ai Paya			Pembelian
19	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	130,00	2012	Labuhan Alas	Hak Pakai	UPT PISDKP Alas	Pembelian
20	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	1.300,00	2012	Lab. Alas	Hak Pakai	Kantor Portal/Resort Dinas Kelautan dan Perikanan	Pembelian
21	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	400,00	2012	Lab. Sumbawa	Hak Pakai		Pembelian
22	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	300,00	2012	Kec. Lunyuk	Hak Pakai		Hibah
23	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	50.000,00	2012	Lab. Jontal Plampang	Hak Pakai		Pembelian
24	Tanah Tambak/Empang/Kolam	20.000,00	2012	Desa Penyaring Moyo Utara	Hak Pakai	Tambak	Pembelian

No	Jenis Barang	Luas (M2)	Tahun	Lokasi/Letak	Status	Penggunaan	Asal Usul
25	Tanah Tambak/Empang /Kolam	50.000,00	2012	Lab Terata Lopok	Hak Pakai		Pembelian
26	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	100,00	2012	Lab Sumbawa Lab Sumbawa	Hak Pakai		Pembelian
27	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	400,00	2012	Empang Atas	Hak Pakai		Pembelian
28	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	400,00	2012	Lab. Terata Kec. Lopok	Hak Pakai		Pembelian

Sumber: Kartu Inventaris Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Tahun 2025.

B. Inventaris Peralatan dan Mesin

Daftar inventaris peralatan diadakan pada tahun 2020-2024 dirincikan pada Tabel dibawah ini.dan mesin pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang

Tabel 2.7 Daftar inventaris peralatan dan mesin pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang diadakan pada tahun 2020-2024

No.	Kendaraan Khusus	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kapal patroli pengawasan	2	2	2	2	2
2.	Kapal kawasan konservasi	1	1	1	1	1
3.	Mobil Alih Teknologi dan Informasi	1	1	1	1	1
4.	Mobil Angkutan Berpendingin	1	1	1	1	1
5.	Mobil Industrialisasi Perikanan (bus penyuluhan)	1	1	1	1	1
6.	Mobil	3	3	3	3	3
7.	Mobil pick up	3	3	3	3	3
8.	Sepeda Motor roda 2	65	63	63	63	63
9.	Sepeda Motor roda 3	7	3	3	3	3
10.	Komputer PC	12	11	11	11	11
11.	Laptop	26	33	33	33	33
12.	Printer	24	43	43	43	43
13.	Air Conditioner	20	10	10	16	16
14.	Meja Kerja	52	52	52	52	52
15.	Kursi	147	137	137	137	137
16.	Lemari	44	44	44	44	44
17.	Filling Kabinet	2	2	2	2	2

Sumber: Kartu Inventaris Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Tahun 2025.

Sarana penunjang lain yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa berupa sarana informasi portal berupa website dengan kode akses: **www.dkp.sumbawakab.go.id** Sarana informasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Sumbawa.

2.1.2.3 Sumber Daya Unit Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa no. 91 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, maka Unit usaha yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa terdiri 12 unit, yaitu:

1. UPT Balai Budidaya Ikan Air Tawar (BBIAT) yang berlokasi di Desa Rhee Kecamatan Rhee;
2. UPT Balai Benih Ikan (BBI) yang berlokasi di Dusun Meno Desa Rhee Loka Kecamatan Rhee;
3. UPT Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjung Pengamas yang berlokasi Kec. Labuhan Badas
4. UPT TPI Teluk Santong yang berlokasi di Kecamatan Plampang.
5. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PISDKP) Alas (wilayah kerja Kecamatan Alas Barat, Alas, dan Buer);
6. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Utan (wilayah kerja Kecamatan Utan dan Rhee);
7. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Labuan Badas (wilayah kerja Kecamatan Labuan Badas, Sumbawa, Unter Iwes, dan Batulanteh);
8. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Moyo (wilayah kerja Kecamatan Moyo Utara, Moyo Hulu dan Moyo Hilir);
9. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lape (wilayah kerja Kecamatan Lopok, Lape, Lantung, dan Ropang);
10. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lunyuk (wilayah kerja Kecamatan Lenangguar, Orong Telu, dan Lunyuk);
11. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Plampang (wilayah kerja Kecamatan Plampang, Labangka, dan Maronge);
12. UPT Pusat Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Empang (wilayah kerja Kecamatan Empang dan Tarano).

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

2.1.3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah :

1. Meningkatnya produksi perikanan dengan indikator kinerja utama yaitu jumlah produksi perikanan dan
2. Tercapainya Target Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator kinerja utama yaitu Kategori Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2024 disajikan berikut. Selain Indikator kinerja di atas Dinas Kelautan dan Perikanan juga melakukan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan Ikan serta Retribusi Produksi Usaha Daerah. Adapun capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan 5 Tahun terakhir adalah sebagai berikut:

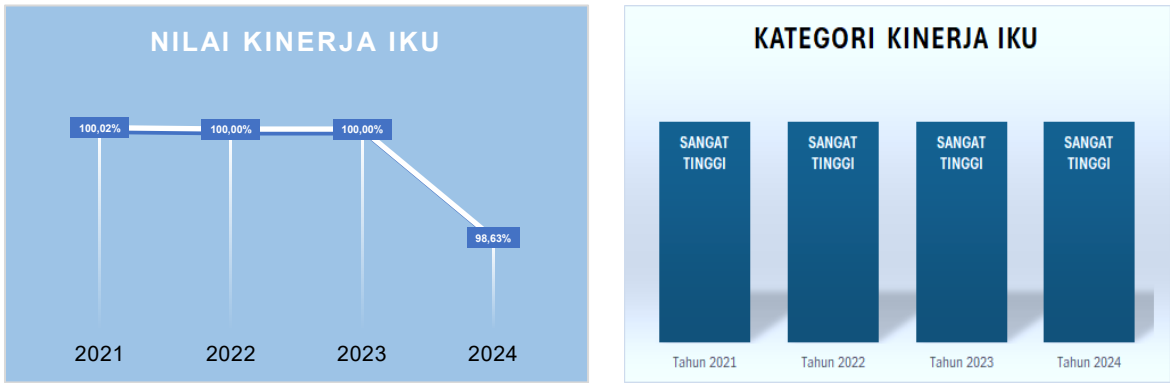
Tabel 2.8 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024

N O	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	665.030,3 5	672.027,0 1	679.511,1 7	688.033,8 8	678.264,5 0

N O	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI CAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Kategori Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	A	A	A	A	A

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan, Data diolah berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan tabel 2.8 di atas, capaian Indikator Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa tahun 2020-2024 rata-rata mencapai target yang ditetapkan rata-rata di atas 100 (sangat tinggi). Nilai Kinerja Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, disajikan pada Gambar 2.7 berikut.



Gambar 2.7 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2024

Analisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2024 sebagai berikut:

A. Produksi Perikanan

Produksi perikanan merupakan penjumlahan dari produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Program yang dilaksanakan untuk mencapai Kinerja tersebut adalah Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Perikanan Budidaya. Adapun Jumlah produksi dan laju pertumbuhan produksi perikanan Kabupaten Sumbawa dapat dilihat pada gambar 2.8 dibawah ini.



Gambar 2.8 Produksi Perikanan Kab. Sumbawa Tahun 2020 – 2024

Produksi Perikanan Kabupaten Sumbawa tahun 2020 sampai dengan 2023 capaian kinerja selalu meningkat setiap tahunnya tetapi mengalami penurunan di tahun 2024 hal ini disebabkan oleh menurunnya produksi perikanan budidaya. Rata-rata laju pertumbuhan produksi perikanan sebesar 0,5%. Produksi perikanan kabupaten Sumbawa merupakan akumulasi dari produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Proporsi perikanan tangkap dan perikanan budidaya Kabupaten Sumbawa dapat dilihat pada gambar 2.9 dibawah ini.



Gambar 2.9 Proporsi Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024

Berdasarkan gambar 2.9 Rata-rata produksi perikanan tangkap kabupaten Sumbawa tahun 2020 – 2024 sebesar 65.655,39 ton dengan rata-rata laju pertumbuhan Produksi sebesar 2,65%. Sedangkan rata-rata produksi perikanan Budidaya tahun 2020-2024 sebesar 610.917,99 ton dengan rata-rata laju pertumbuhan Produksi sebesar 0,27%. Produksi perikanan budidaya memiliki kontribusi yang sangat tinggi sebesar 90% dibandingkan dengan

produksi perikanan tangkap sebesar 10 terhadap total produksi perikanan di Kabupaten Sumbawa.

B. Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas perangkat daerah mengacu pada indikator kinerja peningkatan kategori Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan. Indikator Kategori Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan capaian kinerja tahun 2021-2024 memiliki nilai yang fluktuatif. Pada tahun 2021 capaian kinerja mencapai 84,58 dan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 82,46. Sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan mengalami kenaikan yaitu 82,73 dan 83,29. Penurunan Nilai AKIP ini disebabkan oleh adanya target tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2025 belum sepenuhnya menggambarkan tren peningkatan kinerja, serta tata kelola perencanaan dan pengukuran kinerja yang belum optimal.



Gambar 2.9 Capaian Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan 2020-2024

2.1.3.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pemerintahan yang secara langsung dilaksanakan Dinas Kelautan dan perikanan Tahun 2020-2024, disajikan pada Tabel 2.9 berikut:

Tabel 2.9 Capaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Kelautan dan Perikanan
Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	REALISASI CAPAIAN														
		2020			2021			2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	785.775,73	665.030,35	84,63	671.771,00	672.027,01	100,04	679.509,00	679.511,17	100	688.031,00	688.033,88	100,00	697.364,00	678.264,50	97,26
1.1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	60.429,81	62.279,80	103,06	63.836,80	64.086,53	100,39	65.496,00	65.496,96	100	67.264,00	67.264,15	100,00	69.148,00	69.149,50	100,00
1.2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	725.345,92	602.750,55	83,10	607.934,20	607.940,48	100,00	614.013,00	614.014,21	100	620.767,00	620.769,73	100,00	628.216,00	609.115,00	96,96

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan, Data diolah berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

Analisis capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2024 sebagai berikut:

1. Perikanan Tangkap

Produksi Perikanan Tangkap terdiri dari Produksi Perikanan Laut dan Produksi Perikanan Umum. Data Produksi Berdasarkan Jenis Ikan yang di Tangkap ini tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.10 Produksi Perikanan Tangkap Berdasarkan Jenis Ikan Tahun 2020-2024

No	Jenis Ikan	PRODUKSI TAHUN (TON)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Bambangan (Lutjanus erythropterus)	-	2.601,14	1.784,10	2.148,36	2.702,03
2	Baronang (Siganus corallinus)	66,89	1,64	1,53	1,63	1,55
3	Belanak (Chelon subviridis)	334,92	-	-	-	-
4	Belanak (Mugil cephalus)	-	86,31	76,01	85,90	81,15
5	Betok (Anabas testudineus)	109,03	-	-	-	-
6	Cakalang (Katsuwonus pelamis)	962,11	6.146,48	5.588,14	5.978,74	6.683,21
7	Cumi-cumi (Loligo chinensis)	61,16	1.409,91	1.997,58	1.981,73	2.113,70
8	Ekor Kuning (Paracaesio brevidentata)	3.690,98	1.213,97	720,31	855,32	700,94
9	Gabus (Channa striata)	69,70	-	-	-	-
10	Gurita (Octopus aegina)	-	-	-	302,30	549,38
11	Julung-julung (Ablennes hians)	95,70	-	-	-	-
12	Kakap Merah (Etelis coruscans)	2.982,89	-	-	-	-
13	Kakap Merah (Lutjanus bitaeniatus)	0,28	1,40	0,46	0,78	3,46
14	Kakap Putih (Plectorhinchus gibbosus)	763,24	-	-	-	-
15	Kakap Putih; Baramundi (Lates calcarifer)	0,02	1.096,60	1.144,22	1.214,94	976,21
16	Kembung (Rastrelliger faughni)	1.196,62	1.559,78	2.106,21	2.226,81	1.960,35
17	Kembung Lelaki (Rastrelliger kanagurta)	1,71	-	-	-	-
18	Kerapu Karang (Chephalopholis boenack)	-	2.740,44	1.888,12	2.127,78	2.368,49
19	Kerapu Lumpur (Epinephelus cyanopodus)	1,14	-	-	-	-
20	Kerapu Sunu (Plectropomus areolatus)	2.198,31	1.487,08	1.076,00	1.153,37	881,54
21	Kerapu Sunu (Plectropomus leopardus)	-	-	-	0,34	3,21
22	Kurisi (Pentapodus setosus)	1.763,96	-	-	-	-
23	Kurisi Bali (Pristipomoides filamentosus)	-	40,13	79,91	87,63	88,71
24	Kuwe (Carangoides armatus)	-	1.914,08	1.365,85	1.542,81	1.635,29
25	Kuwe Sirip kuning (Seriola nigrofasciatus)	1.287,74	-	-	-	-
26	Layang (Decapterus maruadsi)	2.159,13	-	-	-	-
27	Layang Biru (Decapterus macarellus)	209,11	4.349,78	4.977,01	4.862,27	4.473,72
28	Layang Lidi; Layar Deles (Decapterus macrosoma)	3,40	4,17	4,50	4,36	4,08
29	Layaran (Istiophorus platypterus)	1.013,10	1.879,45	1.113,47	1.338,12	1.122,72
30	Layur (Trichiurus lepturus)	512,10	2.096,07	4.201,05	4.484,95	4.216,17
31	Lemuru (Sardinella albella)	2.080,26	-	-	-	-
32	Lemuru (Sardinella lemuru)	-	2.741,79	3.703,03	3.522,91	3.194,31
33	Lencam (Lethrinus amboinensis)	1,53	1,65	1,51	1,68	1,02
34	Lencam (Lethrinus hypselopterus)	3.156,19	6.886,96	5.267,52	5.578,23	6.012,94
35	Lencam (Lethrinus xanthochilus)	4,51	2,08	-	2,79	25,86
36	Mas (Cyprinus carpio)	363,72	719,97	775,20	766,14	719,42
37	Mujair (Oreochromis mossambicus)	410,13	-	-	-	-
38	Nila (Oreochromis niloticus)	607,53	1.437,79	1.550,41	1.640,67	1.653,51
39	Pari Batik (Himantura Undulata)	-	6,24	64,27	71,52	70,65
40	Pari Kekeh (Rhynchobatus djiddensis)	-	0,04	0,05	0,05	0,13
41	Pari Kembang (Neotrygon kuhlii)	1,11	-	-	-	-

No	Jenis Ikan	PRODUKSI TAHUN (TON)				
		2020	2021	2022	2023	2024
42	Pari Totol Biru (<i>Taeniura lymma</i>)	1.083,62	400,53	-	-	-
43	Peperek Bondolan (<i>Leiognathus bindus</i>)	395,29	862,77	501,07	539,14	549,94
44	Pisang-pisang (<i>Pterocaesio chrysozona</i>)	42,52	48,82	55,74	54,93	57,14
45	Rajungan (<i>Portunus pelagicus</i>)	23,09	56,60	45,90	56,85	107,37
46	Rumput Laut <i>Gracilaria verrucosa</i> (<i>Gracilaria verrucosa</i>)	-	874,69	822,63	717,35	-
47	Rumput Laut <i>Sargassum muticum</i> (<i>Sargassum muticum</i>)	2.792,42	110,78	20,25	44,84	687,40
48	Selar Batang (<i>Alepes kleinii</i>)	1.898,21	465,78	-	-	-
49	Selar Bentong (<i>Selar crumenophthalmus</i>)	-	0,16	0,18	0,26	0,27
50	Selar Kuning (<i>Selaroides leptolepis</i>)	-	2.157,18	2.023,05	2.113,05	2.077,82
51	Tawes (<i>Barbodes gonionotus</i>)	263,58	243,09	258,40	275,94	394,82
52	Tembang (<i>Sardinella gibbosa</i>)	2.937,89	4.386,78	6.325,25	5.788,27	5.016,01
53	Tenggiri (<i>Scomberomorus commerson</i>)	854,19	1.144,91	2.423,61	2.640,20	2.627,65
54	Teri Nasi (<i>Encrasicholina devisi</i>)	960,46	423,53	-	-	-
55	Teri Samoan (<i>Hypoatherina temminckii</i>)	-	1.261,14	3.432,85	3.346,39	3.029,75
56	Teripang Pasir; Teripang Putih (<i>Holothuria scabra</i>)	-	-	-	-	-
57	Tigawaja (<i>Otolithes ruber</i>)	2,03	1,95	0,96	2,18	13,26
58	Tongkol Komo (<i>Euthynnus affinis</i>)	6.483,07	8.677,93	7.314,21	6.942,77	6.133,76
59	Tuna Mata Besar (<i>Thunnus obesus</i>)	392,27	-	-	-	-
60	Tuna Sirip Kuning; Madidihang (<i>Thunnus albacares</i>)	974,95	2.544,94	2.766,40	2.759,53	2.703,53
61	Ubur-ubur Bulan (<i>Aurelia aurita</i>)	16.813,40	-	20,00	0,32	3.507,03
62	Udang Danau (<i>Palaemon paucidens</i>)	225,87	-	-	-	-
63	Udang Putih; Udang Api-api (<i>Metapenaeus eboracensis</i>)	28,72	-	-	-	-
	Total	62.279,80	64.086,53	65.496,96	67.264,15	69.149,50

Sumber: Data Statistik Perikanan Kabupaten Sumbawa

Beberapa hasil tangkapan yang menjadi ikan komoditas penting di antaranya: tuna, kakap, cakalang, kerapu serta tenggiri. Jenis-jenis ikan ini memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi nelayan, pengusaha perikanan, serta masyarakat pesisir dan memiliki permintaan yang tinggi di pasar domestik.

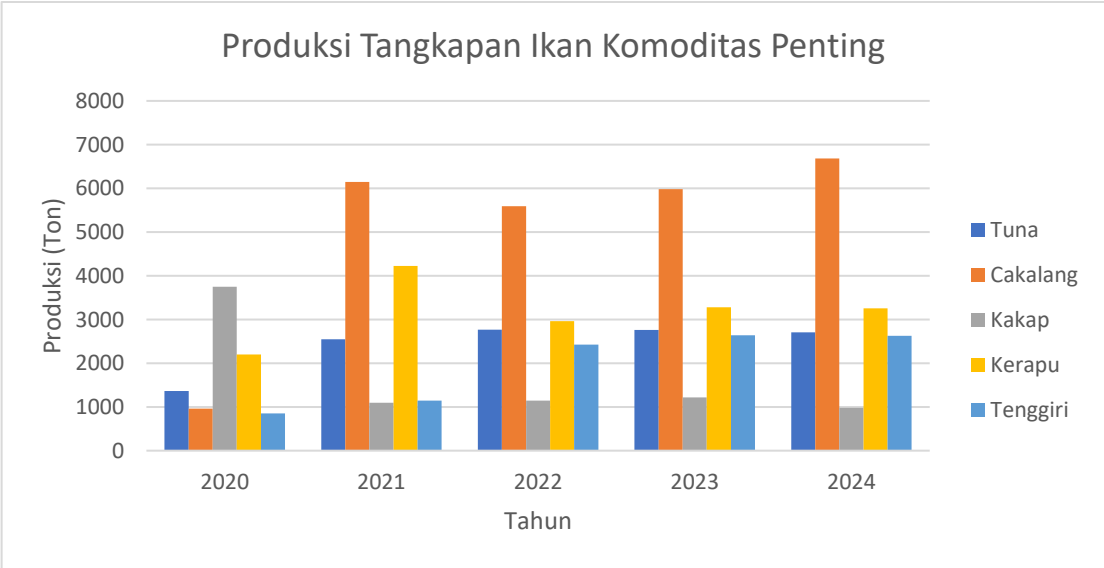
Tabel 2.11 Produksi Tangkapan Ikan Komoditas Penting

No	Jenis Ikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tuna	1367,22	2544,94	2766,4	2759,53	2703,53
2	Cakalang	962,11	6.146,48	5.588,14	5.978,74	6.683,21
3	Kakap	3.746,43	1.098,00	1.144,68	1.215,72	979,67
4	Kerapu	2.199	4.228	2.964	3.281	3.253
5	Tenggiri	854	1.145	2.424	2.640	2.628

Sumber: Data Statistik Perikanan Kabupaten Sumbawa

Produksi Ikan Komoditas Penting yang tersaji pada tabel 2.11 diatas dapat dilihat bahwa Jenis Ikan Cakalang mendominasi produksi tangkapan ikan dengan rata-rata produksi sebesar 5.071,74 Ton per tahun selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2020-2024) yang di ikuti dengan rata-rata produksi hasil Tangkapan komoditas Ikan Tuna sebesar 2.428,32 ton, ikan kerapu sebesar 3.185 ton Ikan Tenggiri sebesar 1.938,2 ton, dan ikan Kakap sebesar 1.636,9 ton. Sebaran lokasi penangkapan ikan komoditas penting ini antara lain di

Kecamatan Alas, Alas Barat, Buer, Empang, Lab. Badas, Labangka, Lape, Lunyuk, Moyo Hilir, Moyo Utara, Plampang, Rhee, Tarano, dan Utan.



Gambar 2.10 Grafik Produksi Ikan Komoditas Penting Hasil Tangkapan

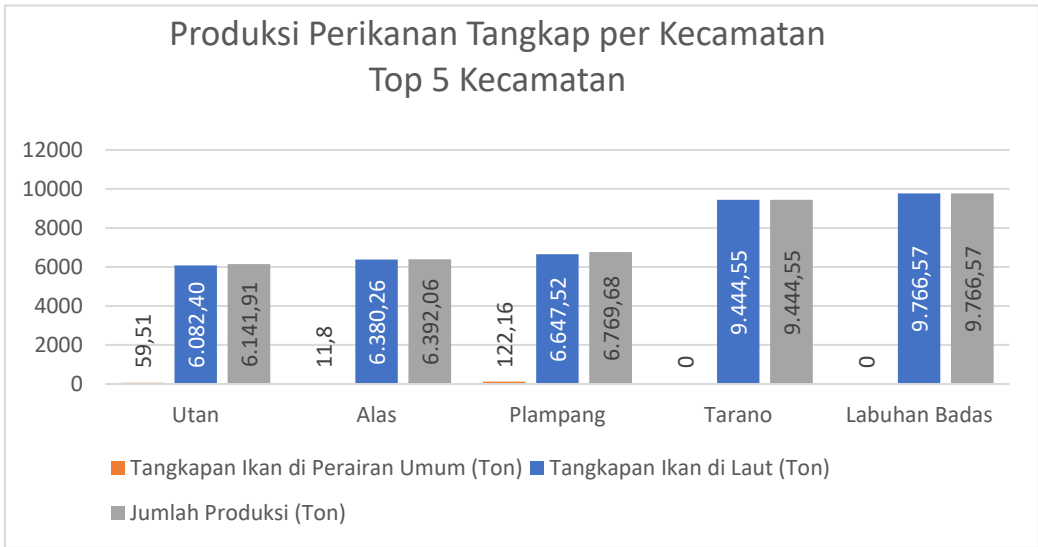
Wilayah Penangkapan ikan di Kabupaten Sumbawa tersebar di 18 kecamatan dari 24 Kecamatan, baik perikanan laut maupun perikanan umum daratan (PUD). Data Produksi Ikan Hasil Tangkapan dapat dilihat pada tabel 2.12 dibawah ini.

Tabel 2.12 Produksi Ikan Hasil Tangkapan di Kabupaten Sumbawa dirinci per Kecamatan Tahun 2024

NO	Kecamatan	Laut (Ton)	Perairan Umum Daratan (Ton)	Jumlah (Ton)
1	Lunyuk	904,36	179,01	1.083,37
2	Alas	6.380,26	11,8	6.392,06
3	Alas Barat	4.992,64	11,26	5.003,90
4	Buer	5.155,31	-	5.155,31
5	Utan	6.082,40	59,51	6.141,91
6	Rhee	2.103,17	-	2.103,17
7	Sumbawa	-	53	53
8	Labuhan Badas	9.766,57	-	9.766,57
9	Moyo Hilir	5.395,03	66,7	5.461,73
10	Moyo Utara	1.226,29	-	1.226,29
11	Moyo Hulu	-	1.239,29	1.239,29
12	Lape	4.210,76	-	4.210,76
13	Lopok	-	603,88	603,88
14	Plampang	6.647,52	122,16	6.769,68
15	Labangka	760	-	760
16	Maronge	3.293,52	260,37	3.553,89
17	Empang	31,25	148,88	180,13
18	Tarano	9.444,55	-	9.444,55
Jumlah		66.393,64	2.755,86	69.149,50
Tahun 2023		64.581,41	2.682,74	67.264,15
Tahun 2022		62.912,96	2.584,00	65.496,96
Tahun 2021		61.686,53	2.400,00	64.086,53
Tahun 2020		59.893,19	2.386,61	62.279,80

Sumber: Data Statistik Perikanan Kabupaten Sumbawa

Kecamatan dengan produksi perikanan tangkap tertinggi terdapat di Kecamatan Labuhan Badas dengan produksi perikanan tangkap sebesar 9.766,57 ton, kemudian diikuti Kecamatan Tarano dengan produksi perikanan tangkap sebesar 9.444,45 ton, Kecamatan Plampang dengan produksi perikanan tangkap sebesar 6.769,68 ton, Kecamatan Alas dengan produksi perikanan tangkap sebesar 6.392,06 ton serta Kecamatan Utan dengan produksi perikanan tangkap sebesar 6.141,91 ton.



Gambar 2.11 Produksi Perikanan Tangkap Per kecamatan

a) Penangkapan Ikan di Laut

Dalam usaha perikanan, luas potensi wilayah perairan laut untuk usaha penangkapan ikan di Kabupaten Sumbawa ± 3.831,72 Km². Dari luas tersebut pada tahun 2024 telah dimanfaatkan seluruhnya dan diperoleh produksi sebesar 67.264,15 ton dengan jenis tangkapan yang dominan antara lain adalah tongkol, cakalang, tembang, Lencam, Kakap. Kegiatan usaha penangkapan ikan di Kabupaten Sumbawa seluruhnya dilakukan oleh nelayan dengan jumlah nelayan 10.639 orang (5.903 RTP). Hingga tahun 2023 belum ada perusahaan penangkapan ikan yang berinvestasi di Kabupaten Sumbawa.

Pengembangan penangkapan ikan di Kabupaten Sumbawa dilakukan dengan konsep pengembangan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) penangkapan ikan yang meliputi 2 WPP yaitu:

1. WPP 573 wilayah bagian selatan Kabupaten Sumbawa meliputi Kecamatan Lunyuk, Kecamatan Labangka, Kecamatan Ropang, sebagian Kecamatan Empang, sebagian Kecamatan Tarano.
2. WPP 713 wilayah bagian utara Kabupaten Sumbawa meliputi Kecamatan Alas Barat, Kecamatan Alas, Kecamatan Buer, Kecamatan Utan, Kecamatan Rhee, Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan Moyo Utara, Kecamatan Moyo Hilir, Kecamatan Lape, Kecamatan Maronge, Kecamatan Plampang, Kecamatan Tarano.

Tabel 2.13 Produksi, Jumlah Nelayan, dan Sarana Penangkapan Ikan LautKabupaten Sumbawa 2024

No.	Kecamatan	Jumlah RTP	Jumlah Nelayan	Jumlah Sarana Penangkapan				Produksi (Ton)
				Jukung	PMT	KM	Alat Tangkap	
1	Alas	425	804	19	149	72	426	6.380,26
2	Alas Barat	393	797	67	118	112	731	4.992,64
3	Buer	389	881	72	113	117	500	5.155,31
4	Utan	401	859	23	242	171	585	6.082,40
5	Rhee	393	784	32	53	11	207	2.103,17
6	Lab. Badas	410	945	213	561	338	1552	9.766,57
7	Moyo Hilir	383	704	16	516	128	683	5.395,03
8	Moyo Utara	388	769	28	155	6	356	1.226,29
9	Lunyuk	137	202		219	4	229	904,36
10	Lape	383	749	16	139	96	559	4.210,76
11	Plampang	398	727	16	82	192	1548	6.647,52
12	Labangka	133	261	43	13	10	150	760,00
13	Maronge	395	727	40	25	108	1251	3.293,52
14	Empang	20	-	-	-	-	30	31,25
15	Tarano	661	1.396	15	206	285	1100	9.444,55
Tahun 2024		5309	10605	628	2591	1650	9907	66.393,64
Tahun 2023		4021	8798	613	2591	1650	8807	64.581,405
Tahun 2022		4637	9781	628	2591	1650	9907	62.912,96
Tahun 2021		4637	9781	628	2555	1640	8251	61.686,53
Tahun 2020		5001	9504	609	2553	1635	8171	59.893,19

Sumber: Data Statistik Perikanan Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan tabel 2.10 diatas dapat dilihat produksi perikanan tangkap di wilayah laut tertinggi terdapat di Kecamatan Labuhan Badas dengan produksi perikanan tangkap sebesar 9.766,57 ton, kemudian diikuti Kecamatan Tarano dengan produksi perikanan tangkap Sebesar 9.444,45 ton, Kecamatan Plampang dengan produksi perikanan tangkap sebesar 6.647,52 ton, Kecamatan Alas dengan produksi perikanan tangkap sebesar 6.380,26 ton serta Kecamatan Utan dengan produksi perikanan tangkap Sebesar 6.082,40 ton. Jenis komoditas ikan yang ditangkap antara lain: Ikan kakap, Kerapu, Tuna, Tenggiri, Cakalang, Teri, Tembang, Lemuru, Layang, Layur, dll.

b) Penangkapan Ikan di Perairan Umum Daratan

Perairan umum daratan adalah perairan yang bukan milik perorangan yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air laut ke daratan yang mengandung sumberdaya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial untuk dimanfaatkan dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya. Perairan umum daratan terdiri dari sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya (rawa banjiran, estuari, kolong bekas galian tambang dan embung).

Luas perairan umum yang dimanfaatkan di Kabupaten Sumbawa sampai saat ini adalah seluas 1.608,94 Ha dan sekitar 2.024,31 Ha merupakan sumberdaya potensial untuk kegiatan perikanan. Produksi penangkapan di perairan umum pada tahun 2024 sebesar 2.755,86 ton.

Tabel 2.14 Produksi, Jumlah Nelayan, Armada, dan Alat Tangkap di Perairan Umum Kabupaten Sumbawa 2024

No	Kecamatan	Jumlah Nelayan	Tanpa Perahu	Armada		Alat Tangkap		Bagan Perahu	Jumlah (Ton)
				Perahu Tanpa Motor	Perahu Motor Tenpel	Pancing	Jaring		
1	Alas	27	25	-	-	23	-	-	11,8
2	Alas Barat	29	23	-	-	25	-	-	11,26
3	Utan	35	28	2	-	28	2	-	59,51
4	Sumbawa	20	18	2	1	19	2	-	53
5	Moyo Hilir	45	42	-	1	45	-	-	66,7
6	Moyo Hulu	228	140	32	58	112	63	66	1.239,29
7	Lunyuk	67	50	14	-	50	14	-	179,01
8	Lopok	138	30	70	25	88	11	-	603,88
9	Plampang	92	90	2	-	90	2	-	122,16
10	Maronge	90	68	22	-	45	44	-	260,37
11	Empang	87	83	3	2	84	2	-	148,88
Tahun 2024		858	597	147	88	609	140	66	2.755,86
Tahun 2023		858	597	147	86	609	140	66	2.682,74
Tahun 2022		858	597	147	86	609	140	66	2.584,00
Tahun 2021		858	597	147	79	606	139	66	2,400.00
Tahun 2020		858	597	147	79	606	139	66	2,386.57

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa

Kegiatan penangkapan ikan di perairan umum banyak dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, embung, dan bendungan-bendungan. Perairan ini termasuk dalam kategori perairan daratan yang dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama nelayan tradisional dan nelayan skala kecil. Produksi perikanan tangkap di perairan umum tertinggi berasal dari kecamatan Moyo Hulu, Sebesar 1.239,29 ton, Kec. Lopok sebesar 603,88 ton, Kecamatan Maronge, sebesar 260,37 ton, kecamatan lunyuk sebesar 179,01 ton dan kecamatan empang sebesar 148,88. Komoditas hasil tangkapan di perairan umum ini antara lain ikan Nila, Ikan Mas, Ikan Tawes, Ikan Lele, Ikan Gabus dan Ikan Betok.

2. Perikanan Budidaya

Potensi area untuk pengembangan budidaya di Kabupaten Sumbawa adalah sebesar 21.850 Ha dengan potensi produksi sebesar 912.093,40 ton/tahun. Tingkat pemanfaatan sampai tahun 2024 sebesar 17.199,40 ha atau termanfaatkan sebesar 50% dari potensi dengan produksi sebesar 609.115 ton/tahun.

Secara terperinci realisasi produksi perikanan budidaya dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.15 berikut ini :

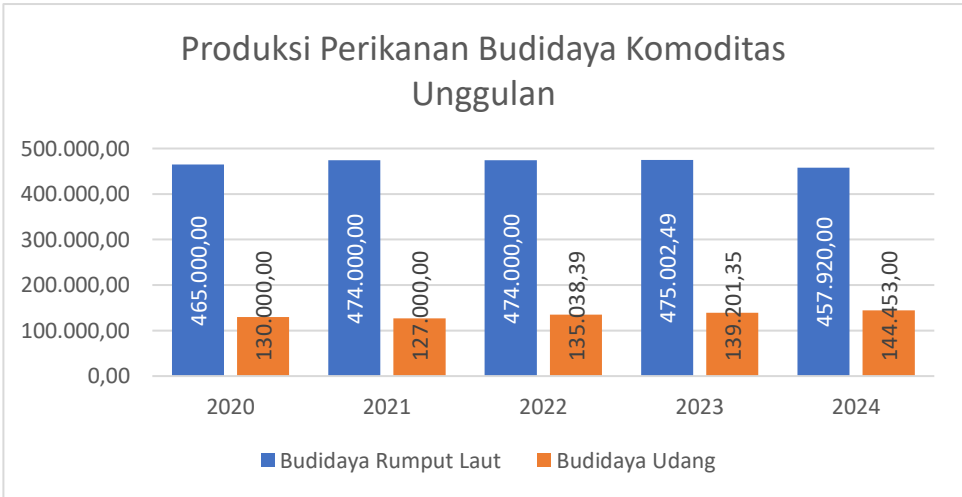
Tabel 2.15 Realisasi Produksi Budidaya per Komoditas Tahun 2020-2024

Produksi	Produksi (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Budidaya Perikanan	602.750,55	607.940,48	614.014,21	620.775,71	609.115,00
- Budidaya Rumput Laut	465.000,00	474.000,00	474.000,00	475.002,49	457.920,00

Produksi	Produksi (Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024
- Budidaya Udang	130.000,00	127.000,00	135.038,39	139.201,35	144.453,00
- Budidaya Bandeng	5.270,76	4.420,00	4.840,00	4.500,00	4.563,00
- Budidaya Ikan Air Tawar	1.428,01	2.035,26	864,94	1.592,04	1.704,82
- Budidaya Kerapu	405,00	407,00	407	430	420
- Budidaya Ikan Lainnya	646,78	78,22	91,6	43,85	43,85
- Budidaya Mutiara	-	-	2,2	2,4	2,53
- Budidaya Bawal Bintang	-	-	-	3,52	3,35
- Budidaya Lobster	-	-	-	0,06	0,5

Sumber: Data Statistik Perikanan Kabupaten Sumbawa

Dilihat dari Tabel produksi budidaya per komoditas di atas budidaya rumput laut dan budidaya udang merupakan komoditas dengan produksi tertinggi di Kabupaten Sumbawa. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, disebutkan Kabupaten Sumbawa menjadi lokasi prioritas pembangunan kawasan perikanan dan sentra rumput laut dan sentra produksi berbasis udang.



Gambar 2.12 Grafik Produksi Perikanan Budidaya Komoditas Unggulan

a) Produksi Budidaya Rumput Laut

Kegiatan usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Sumbawa merupakan jenis usaha budidaya yang cukup berkembang dengan baik. Lokasi usaha budidaya rumput laut terbesar tersebar pada 10 kecamatan yaitu: 1) Kecamatan Alas, 2) Kecamatan Alas Barat, 3) Kecamatan Buer, 4) Kecamatan Utan, 5) Kecamatan Moyo Hilir, 6) Kecamatan Lab. Badas, 7) Kecamatan Lape, 8) Kecamatan Maronge, 9) Kecamatan Plampang dan 10) Kecamatan Tarano.

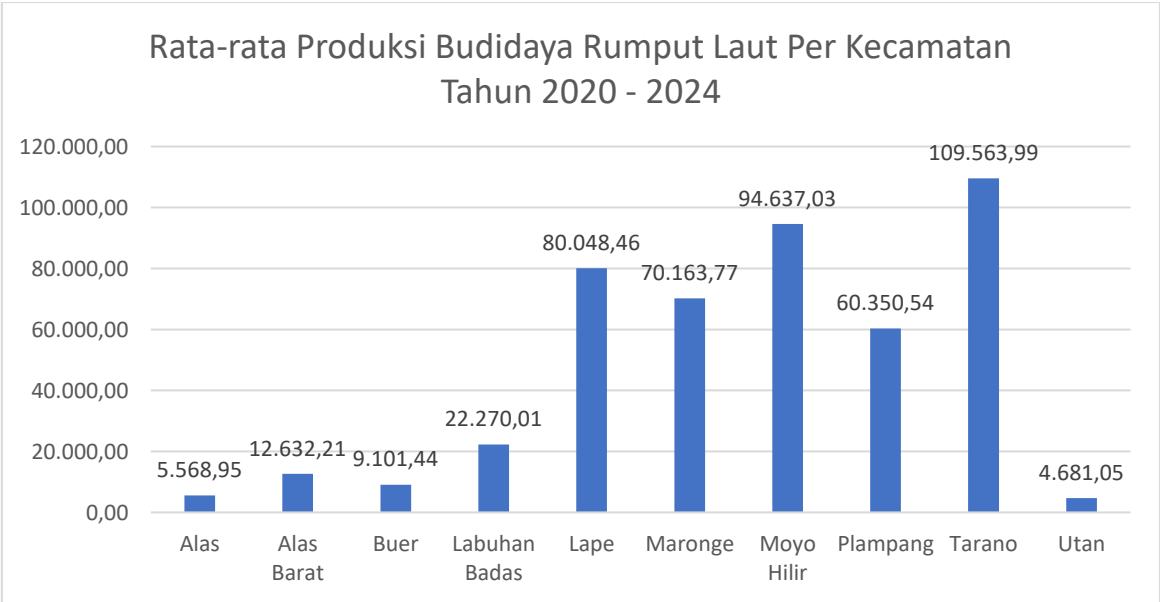
Tabel 2.16 Produksi Budidaya Rumput Laut Kab. Sumbawa 2020-2024

No	Kecamatan	Luas Area Budidaya (Ha)	Produksi Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Alas	71,24	5.549,96	5.549,96	5.549,96	5.571,52	5.623,36
2	Alas Barat	1.070,50	13.150,08	13.150,08	12.150,08	12.197,28	12.513,54
3	Buer	249,80	9.063,49	9.063,49	9.073,49	9.108,74	9.197,97
4	Labuhan Badas	1.229,00	22.445,85	22.445,85	22.000,85	22.086,32	22.371,19

No	Kecamatan	Luas Area Budidaya (Ha)	Produksi Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Lape	1.311,51	79.746,49	79.746,49	79.776,20	80.086,13	80.886,99
6	Maronge	1.119,40	68.984,54	69.984,54	70.199,87	70.472,60	71.177,32
7	Moyo Hilir	1.208,50	92.935,23	99.935,23	100.205,23	100.594,53	79.514,93
8	Plampang	1.245,38	60.136,35	60.136,35	60.136,35	60.369,98	60.973,68
9	Tarano	1.711,00	108.323,67	109.323,67	109.408,43	109.832,93	110.931,26
10	Utan	214,17	4.664,34	4.664,34	4.664,34	4.682,46	4.729,78
Jumlah		9.430,50	465.000,00	474.000,00	473.164,80	475.002,49	457.920,00

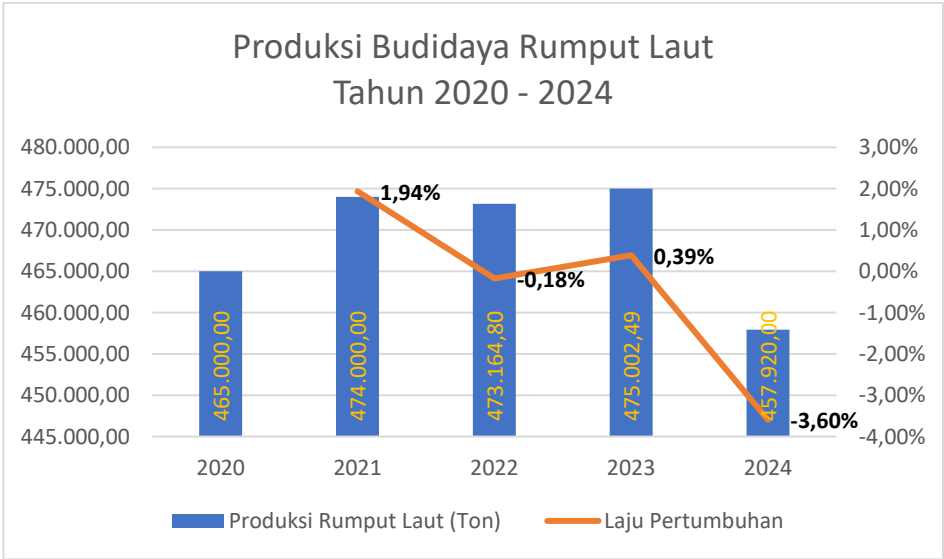
Sumber: Data Statistik Perikanan Kabupaten Sumbawa

Dari data tabel 2.16 diatas, 5 kecamatan dengan Rata-rata produksi budidaya Rumput Laut tertinggi berasal dari kecamatan Tarano sebesar 109.563,99 ton, Kecamatan Moyo Hilir sebesar 94.637,03 ton, Kecamatan Lape 80.048,46 ton, Kecamatan Maronge sebesar 70.163,77 ton dan Kecamatan Plampang sebesar 60.350,64 ton. Produktivitas Budidaya Rumput Laut Kabupaten Sumbawa mencapai 48,56 Ton/Ha/Tahun.



Gambar 2.13 Rata-rata Produksi Budidaya Rumput Laut per Kecamatan Tahun 2020 – 2024

Produksi budidaya Rumput Laut Kabupaten Sumbawa tahun 2020 – 2024 sangat fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan minus 0,36%. Penurunan produksi tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 3,6% dari jumlah produksi budidaya Rumput Laut tahun 2023. Produksi budidaya Rumput Laut tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar 2.14 dibawah ini.



Gambar 2.14 Grafik Produksi Rumput Laut Tahun 2020 – 2024

Pengembangan budidaya Rumput Laut masih menghadapi beberapa kendala yang cukup mempengaruhi aktivitas budidaya diantaranya adalah:

- 1. kurangnya bibit yang bermutu,
- 2. kurangnya modal untuk pengembangan usaha,
- 3. adanya serangan hama penyakit, dan
- 4. kurangnya kualitas/mutu rumput laut (kering).

b) Produksi Budidaya Udang

Tingkat produktivitas usaha budidaya udang yang dilakukan pembudidaya udang (tradisional plus) masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah tingkat penguasaan teknologi budidaya udang masih rendah. Untuk itu sangat diperlukan adanya kegiatan pelatihan, magang ataupun kegiatan penyuluhan, sehingga diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pembudidaya udang.

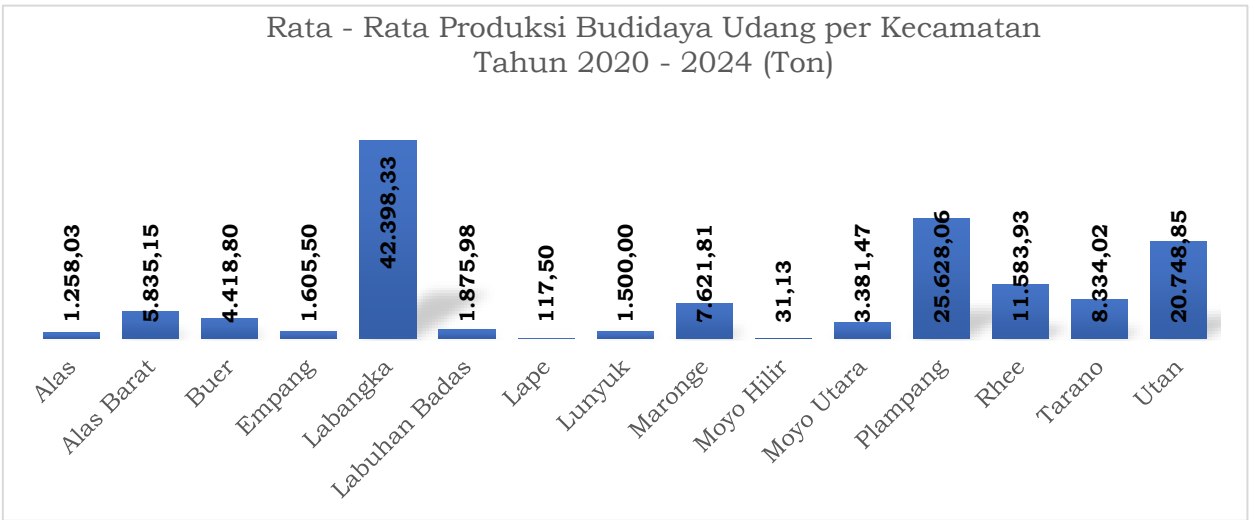
Tabel 2.17 Produksi Budidaya Udang Per Kecamatan Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)	Produksi Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Alas	31,00	1.198,18	1.198,18	1.268,18	1.306,23	1.319,38
2	Alas Barat	72,00	5.530,95	5.530,95	5.900,30	6.077,31	6.136,23
3	Buer	48,00	4.160,41	4.160,41	4.480,40	4.614,81	4.677,96
4	Empang	42,00	1.038,47	1.038,47	1.938,10	1.996,24	2.016,24
5	Labangka	185,00	40.053,60	40.053,60	43.280,60	44.579,02	44.024,81
6	Labuhan Badas	22,50	1.850,10	1.850,10	1.850,11	1.905,61	1.924,00
7	Lape	23,00	114,59	114,59	119,67	123,26	115,38
8	Lunyuk	37,00	-	-	-	-	1.500,00
9	Maronge	240,70	7.161,10	7.161,10	7.750,20	7.982,71	8.053,94
10	Moyo Hilir	6,00	30,38	30,38	30,9	31,83	32,15
11	Moyo Utara	272,00	3.354,31	3.354,31	3.354,31	3.454,94	3.389,49
12	Plampang	646,00	24.133,71	24.133,71	25.700,71	26.471,73	27.700,42
13	Rhee	143,00	12.742,11	10.742,11	11.215,66	11.552,13	11.667,65

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)	Produksi Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
14	Tarano	165,75	8.032,90	8.032,90	8.429,00	8.793,68	8.381,62
15	Utan	285,00	20.599,19	19.599,19	19.720,25	20.311,86	23.513,74
Jumlah		2.218,95	130.000,00	127.000,00	135.038,39	139.201,36	144.453,00

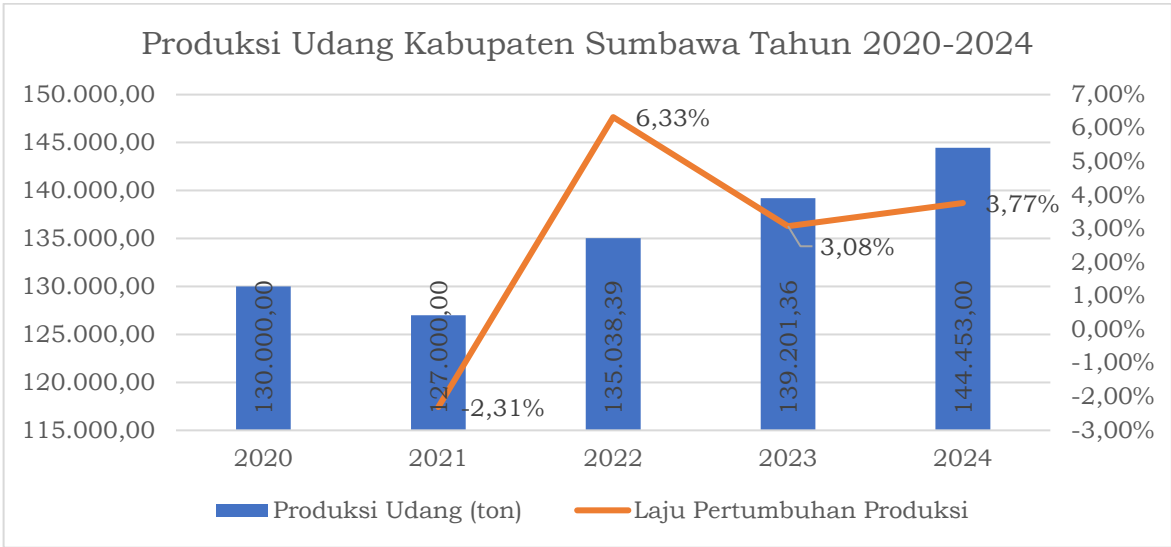
Sumber: Data Statistik Perikanan Kabupaten Sumbawa

Dari data tabel 2.17 diatas, 5 kecamatan dengan Rata-rata produksi budidaya Udang tertinggi berasal dari kecamatan Labangka sebesar 42.398,33 ton, Kecamatan Plampang sebesar 25.628,06 ton, Kecamatan Utan sebesar 20.748,85 ton, Kecamatan Rhee sebesar 11.583,93 ton dan Kecamatan Tarano sebesar 8.334,02 ton.



Gambar 2.15 Grafik Produksi Budidaya Udang per Kecamatan Tahun 2020-2024

Produktivitas Budidaya udang di Kabupaten Sumbawa mencapai 65,10 Ton/Ha/Tahun. Produksi budidaya Udang Kabupaten Sumbawa tahun 2020 – 2024 sangat fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,7%. Pada tahun 2021 produksi Udang kabupaten Sumbawa turun sebesar 3.000 ton atau 2,31% dari tahun 2020 kemudian mengalami peningkatan produksi sebesar 6,33% pada tahun 2022, 3,08% pada tahun 2023 dan 3,77% pada tahun 2024. Produksi budidaya Udang tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar 2.16 dibawah ini.



Gambar 2.16 Produksi Udang Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024

Ketersediaan sarana produksi budidaya udang terutama benih udang (benur) dipenuhi dari hatchery lokal dan sebagian masih didatangkan dari luar kabupaten. Benih-benih yang digunakan sudah dilengkapi dengan sertifikasi benih bermutu sehingga produksi dan kualitas udang yang dihasilkan diharapkan mampu mendukung total produksi ikan di Kabupaten Sumbawa.

Hatchery udang di Kabupaten Sumbawa berjumlah 7 perusahaan yang terletak di Kecamatan Rhee dan Labuhan Badas. Kapasitas produksi masing-masing hatchery mencapai 5 - 22 juta ekor benur per bulan. Beberapa hatchery udang yang masih beroperasi di Kabupaten Sumbawa adalah: 1) Anugerah Tambora Marina (Kec. Rhee), 2) PT. Talenta Jaya Mandiri (Kec. Rhee), 3) PT. Lautan Mitra Abadi (Kec. Rhee), 4) PT. Suri Tani Pemuka (Labuhan Sumbawa Kec. Labuhan Badas), 5) PT. Putra Alam Samudera (Kec. Rhee), 6) PT. Swadaya Mitra Perkasa (Desa Luk, Kec. Rhee), 7) PT. Anugrah Agung Sumbawa (Desa Luk, Kec. Rhee). Tercatat produksi benur yang dihasilkan pada tahun 2024 adalah 657.976.815 ekor.

c) Budidaya Ikan Air Tawar

Potensi budidaya ikan air tawar yang terdiri dari budidaya ikan di kolam, mina padi dan keramba jaring apung (KJA) di Kabupaten Sumbawa adalah 2.327,32 Ha. Tingkat pemanfaatan budidaya air tawar pada Tahun 2024 seluas 367,10 Ha (15,77 %) dengan produksi sebesar 1.704,82 Ton. Secara umum kegiatan budidaya ikan air tawar dilakukan oleh masyarakat, dengan penerapan sistem teknologi tradisional dan tradisional plus sehingga belum terlihat peningkatan jumlah produksi yang optimal. Peningkatan produksi secara signifikan tentunya harus dengan penerapan teknologi yang lebih tepat guna, dengan demikian pengembangannya juga bergantung pada besarnya investasi yang harus dilakukan. Masing-masing rincian data budidaya air tawar dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Table 2.18 Data Luas Lahan dan Produksi Budidaya Ikan di Kolam di Rinci Per Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Areal (Ha)	RTP	Produksi (Ton)					
				Nila	Mas	Tawes	Lele	Ikan Lainnya	Jumlah
1	Lunyuk	14	45	43,640	-	-	12,470	-	56,110
2	Orong Telu	12,89	80	22,710	-	-	11,920	-	34,630
3	Alas	24,39	112	100,760	50,500	-	22,690	-	173,950
4	Alas Barat	19,42	76	19,630	-	-	31,040	-	50,670
5	Buer	19,35	60	21,700	25,250	-	15,310	-	62,260
6	Utan	13,25	47	39,470	33,330	-	19,960	-	92,760
7	Rhee	13,55	60	101,160	72,720	-	26,930	19,060	219,870
8	Labuhan Badas	11,86	55	103,150	-	-	60,250	-	163,400
9	Batulanteh	7	100	45,320	36,360	-	14,170	15,970	111,820
10	Sumbawa	9,79	120	36,100	14,140	-	2,200	-	52,440
11	Unter Iwes	9,81	35	37,690	40,400	-	21,840	12,770	112,700
12	Moyo Hilir	12,8	44	31,540	-	-	15,140	-	46,680
13	Moyo Utara	15,96	49	22,230	-	-	15,330	-	37,560
14	Moyo Hulu	16,9	120	51,600	25,250	-	19,040	-	95,890
15	Ropang	7,8	39	29,760	-	-	6,950	-	36,710
16	Lantung	7,92	40	32,730	-	-	6,390	-	39,120
17	Lenangguar	6,4	63	25,390	-	-	9,450	-	34,840
18	Lape	12,47	39	34,170	5,050	-	19,490	-	58,710

No	Kecamatan	Luas Areal (Ha)	RTP	Produksi (Ton)					
				Nila	Mas	Tawes	Lele	Ikan Lainnya	Jumlah
19	Lopok	27,99	141	37,170	-	-	48,340	-	85,510
20	Plampang	10,75	57	29,750	-	-	14,420	-	44,170
21	Labangka	5,88	32	14,430	-	-	4,890	-	19,320
22	Maronge	7,89	26	26,180	-	-	12,670	-	38,850
23	Empang	11,65	35	26,120	-	-	14,250	-	40,370
24	Tarano	8,34	27	22,030	-	-	21,360	-	43,390
Jumlah		308,06	1.511,00	954,430	303,000	-	446,500	47,800	1751,730
Tahun 2023		308,06	1.511,00	955,020	300,000	-	321,189	15,834	1592,043
Tahun 2022		308,06	1.511,00	453,99	16,50	0,00	365,56	-	836,05
Tahun 2021		308,06	1.511,00	453,99	16,50	0,00	365,56	-	836,05
Tahun 2020		308,06	1.511,00	853,40	227,00	610,98	380,00	-	2038,99

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa

Table 2. 19 Data Produksi Budidaya Ikan di Keramba Air Deras Tahun 2024

No	Kecamatan/ Desa	Jumlah RTP	Keramba/ KJA	Luas (m ²)	Produksi (Ton)
1.	Alas				
	- Marente	24	24	73	12,54
	- Juran Alas	13	17	76	6,79
2	Sumbawa				
	-Lempeh	3	5	22	3,04
3	Moyo Hulu				
	-Maman	20	20	102	12,12
	-Marga karya	14	14	63	6,05
4	Lunyuk				
	-Lunyuk Ode	30	36	110	13,01
5	Lenangguar	20	20	70	9,03
6	Empang	10	10	40	4,8
Jumlah		134	146	556	67,380
Tahun 2023		134	146	556	84,273
Tahun 2022		136	148	556	52,09
Tahun 2021		136	148	556	54,09
Tahun 2020		136	148	556	52,09

Sumber: Data Statistik Perikanan Kabupaten Sumbawa

Perkembangan usaha budidaya ikan air tawar baik di kolam, minapadi maupun karamba masih belum signifikan hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu:

- 1) tingkat penerapan teknologi belum optimal dan
- 2) pemasaran hasil produksi sangat terbatas dan kalah bersaing dengan ikan laut.

Mengantisipasi hal itu perlu dilakukan kegiatan pelatihan dan penyuluhan serta pengembangan komoditas-komoditas tertentu yang mempunyai keunggulan yaitu :

- 1) mempunyai nilai ekonomi tinggi;
- 2) menyaingi pasar lokal dan luar negeri yang tinggi ;

3) dapat dibudidayakan dan dikembangkan secara massal.

Penyediaan benih Budidaya air tawar di Kabupaten Sumbawa ditunjang melalui Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT). Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) berjumlah 1 buah dengan klasifikasi BBI lokal yaitu BBIAT Rhee dengan luas 2 Ha. Beberapa fasilitas yang mendukung aktivitas di BBI terdiri dari fasilitas kantor, fasilitas pembenihan dan fasilitas untuk pegawai. Adapun jenis ikan yang dikembangkan di BBIAT yaitu ikan Karper, Nila Gift, Tawes, Lele Dumbo dan Gurame.

Produksi benih ikan BBIAT pada Tahun 2024 yaitu sebanyak 801.650 ekor, yang berasal dari ikan jenis Karper, Nila Gift, dan Tawes. Hasil produksi ikan dari BBIAT didistribusikan untuk kepentingan masyarakat umum baik dalam bentuk restocking maupun budidaya kolam.

2.1.3.3 Indikator Kinerja Lainnya

Dalam mendukung tercapainya indikator kinerja Utama dan indikator kinerja kunci, Dinas Kelautan dan Perikanan menetapkan indikator kinerja yang tersusun dalam perjanjian kinerja pegawai berjenjang. Adapun indikator kinerja dan realisasi kinerja masing-masing bidang dirincikan pada bagian lampiran. Analisa capaian kinerja disajikan sebagai berikut :

1. Produksi Garam

Luas lahan yang dimanfaatkan oleh petambak garam tahun 2024 di Desa labuhan Bajo Kecamatan Utan Sebesar 12 Ha, Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape sebesar 20 Ha, Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano sebesar 67 Ha dan Desa Plampang Sebesar 80 Ha dengan total produksi mencapai 5.362,5 ton senilai Rp. 3.094.950.000. Produksi Usaha Garam Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

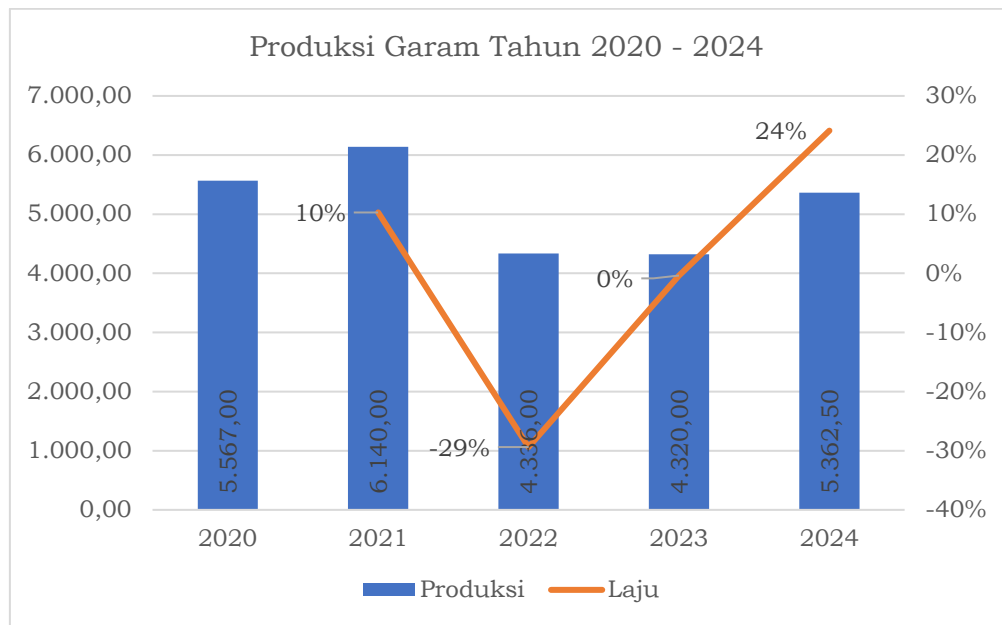
Tabel 2.20 Produksi Usaha Garam Kab. Sumbawa Tahun 2024

NO	KECAMATAN/DESA	LUAS LAHAN (Ha)	PELAKU USAHA (ORANG)/RTPP	PRODUKSI (TON)
1	Utan			
	- Desa Labuhan Bajo	12,00	20,00	356,00
2	Lape			
	- Desa Labuhan Kuris	20,00	10,00	250,00
3	Tarano			
	- Desa Lab. Bontong	67,00	115,00	3.312,50
4	Plampang			
	- CV. Sira Kristal Nusantara	80,00	15,00	1.444,00
Jumlah		179,00	160,00	5.362,50
Tahun 2023		93,00	145	4.320,00
Tahun 2022		344,16	211	4.336,00
Tahun 2021		344,16	211	6.140,00
Tahun 2020		333,09	201	5.567,00

Sumber: Data Statistik Perikanan Kabupaten Sumbawa

Produktivitas Produksi Garam Kabupaten Sumbawa sebesar 19,88 ton/ha/Tahun, dengan rata-rata produksi sebesar 5.145,10 ton dengan rata-

rata luas lahan sebesar 258,68 Ha selama 5 Tahun terakhir (2020-2024). Produksi garam selama 5 tahun terakhir (2020-2024) mengalami fluktuasi signifikan, sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, teknologi, dan pasar. Pada tahun 2022 menjadi titik kritis dengan penurunan tajam yang memengaruhi dua tahun berikutnya. Produksi dan laju pertumbuhan produksi Garam, dapat dilihat pada Gambar dibawah ini:



Gambar 2.17 Produksi Garam Tahun 2020-2024

Pengembangan budidaya Garam masih menghadapi beberapa kendala yang cukup mempengaruhi aktivitas budidaya diantaranya:

- a. Metode produksi tradisional/produktivitas rendah
- b. Kualitas garam tidak memenuhi standar (NaCl rendah)
- c. Harga jual rendah di tingkat petani
- d. Tata niaga belum efisien

2. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Dalam rangka peningkatan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan masih didominasi usaha skala mikro dan kecil, yang memiliki beberapa keterbatasan baik menyangkut kualitas SDM, permodalan, akses pasar dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan produktivitas usaha di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan pada umumnya rendah sehingga tingkat kesejahteraan pelaku usahanya rendah.

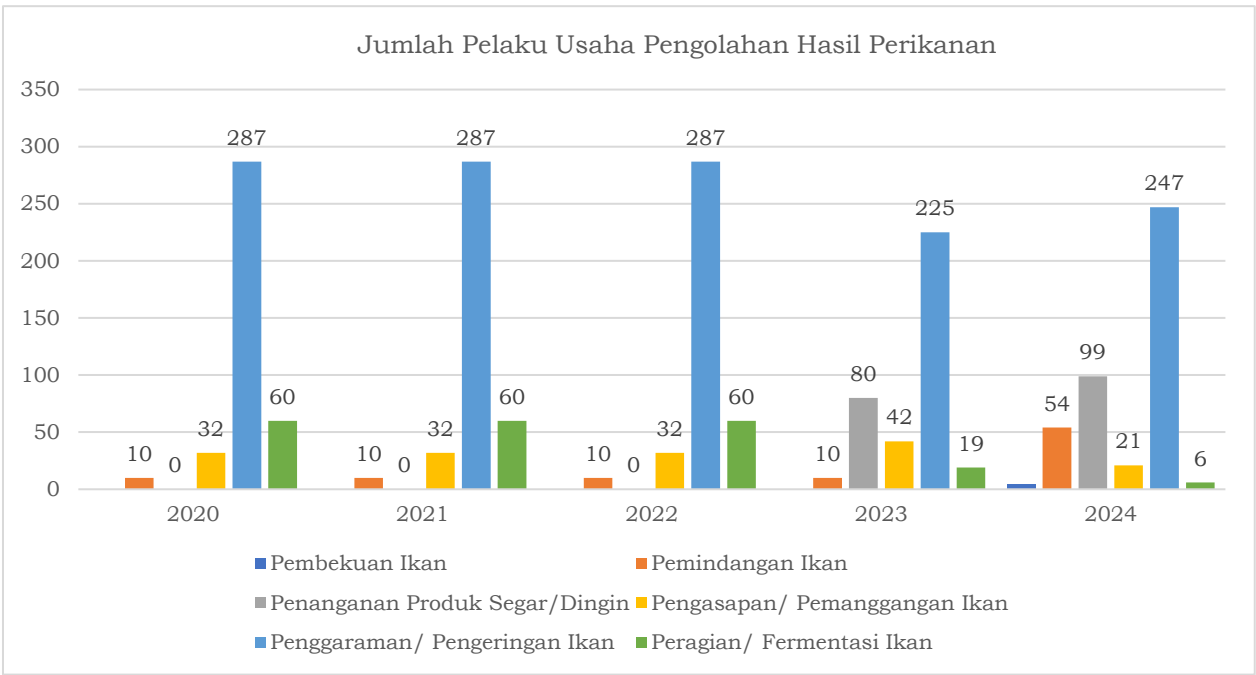
Sebagian besar pelaku usaha pengolahan hasil perikanan masih menerapkan teknologi sederhana yang menghasilkan produksi primer sehingga nilai tambah ekonomi yang diperoleh rendah. Hal ini mendorong terjadinya pemborosan sumberdaya perikanan, karena untuk mendapatkan margin yang besar dalam usaha pengolahan diperlukan tingkat eksploitasi yang besar juga.

Mutu produk dari hasil pengolahan ikan maupun non ikan masih rendah, belum lagi kaitannya dengan kemasan yang kurang menarik. Hal ini merupakan hambatan dalam pemasaran produk perikanan karena saat ini persaingan dalam perdagangan hasil perikanan di pasar internasional cenderung meningkat dimana standar mutu dan keamanan produk merupakan syarat utama dalam sistem pemasaran.

Tabel 2.21 Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan

No	KECAMATAN	Pembekuan Ikan	Pemindangan Ikan	Penanganan Produk Segar/ Dingin	Pengasapan/ Pemanggangan Ikan	Penggaraman/ Pengeringan Ikan	Peragian/ Fermentasi Ikan	Total
1	Alas	-	-	2	10	2	-	14
2	Alas Barat	-	-	-	-	66	-	66
3	Buer	-	34	48	-	16	-	98
4	Empang	-	1	-	-	-	-	1
5	Labuhan Badas	2	4	16	11	50	-	83
6	Lape	-	-	2	-	2	1	5
7	Lopok	-	-	2	-	6	-	8
8	Maronge	-	-	1	-	6	-	7
9	Moyo Hilir	-	-	-	-	7	-	7
10	Moyo Hulu	-	-	-	-	52	-	52
11	Moyo Utara	-	6	4	-	13	-	23
12	Plampang	-	-	-	-	-	-	0
13	Rhee	-	-	-	-	11	-	11
14	Sumbawa	1	-	2	-	2	1	6
15	Tarano	1	9	20	-	-	4	34
16	Unter Iwes	-	-	2	-	-	-	2
17	Utan	-	-	-	-	14	-	14
TOTAL		4	54	99	21	247	6	431
2023		-	10	80	42	225	19	376
2022		-	10	-	32	287	60	389
2021		-	10	-	32	287	60	389
2020		-	10	-	32	287	60	389

Sumber: Data Statistik Perikanan Kabupaten Sumbawa



Gambar 2.18 Grafik Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan

Dari data diatas dapat dilihat beberapa usaha pengolahan hasil perikanan yang ada di Kabupaten Sumbawa, yaitu usaha pembekuan, penggaraman, pemindangan, penanganan produk segar/dingin, peragian/fermentasi ikan dan pengasapan/ pemanggangan ikan. Usaha pengolahan hasil perikanan ini

didominasi oleh pelaku usaha penggaraman dengan produk berupa Ikan asin, ikan bage dan lainnya, dengan industri berskala rumah tangga.

Berbagai kendala yang terjadi pada tahap pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan menunjukkan perlunya intervensi terpadu dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi antara lain:

- a. Fluktuasi ketersediaan bahan baku
- b. Teknologi terbatas/tradisional
- c. SDM kurang terampil
- d. Tidak memenuhi standar mutu pangan
- e. Pendanaan/modal terbatas
- f. Persaingan dengan produk impor dan industri besar

3. Pengawasan Sumber daya Perikanan

Berdasarkan Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pembagian urusan kelautan dan perikanan sub urusan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil bahwa pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi, penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi kewenangan provinsi sehingga kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan terhadap pengendalian dan pengawasan di wilayah-wilayah tersebut di atas. Dengan adanya Undang-undang tersebut maka pengendalian dan pengawasan yang menjadi wewenang kabupaten terbatas di perairan darat yang diukur dari garis pasang surut terendah air laut ke arah darat.

Perairan darat meliputi sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya (kolong/bekas galian, situ dan embung). Menurut Permendagri nomor 90. Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah bahwa sub kegiatan program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota dan pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota. Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Perikanan 5 tahun terakhir (2020-2024) dilakukan di Perairan umum sesuai dengan tabel 2.22 dibawah ini:

Tabel 2.22 Lokasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

No	Indikator	Lokasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perairan Umum yang terawasi	5 Lokasi 1. DAS Desa Baru Tahan Moyo Utara 2. DAS Brang Biji Sumbawa 3. Bendungan Pungka Unter Iwes 4. Bendungan Sejari I Pelampang 5. DAS Desa Tepal Batu Lante	5 Lokasi 1. Bendungan Batu Bulan Moyo Hulu 2. Bendungan Mamak Langam 3. Bendungan Gapit Plampang 4. DAS Marente Alas 5. DAS Sabedo Utan	5 Lokasi 1. Bendungan TIU KULIT Maronge 2. Embung Penyaring / Raberas 3. DAS Rhee 4. Embung Olat Rawa Moyo Hilir 5. Embung Labangka	5 Lokasi 1. Embung Serading / Ngali Lape 2. DAS Moyo Hilir 3. DAS Jompong Plampang 4. Embung Pemasar 5. Embung Batu Bangka	5 Lokasi 1. Bendungan Plara Lunyuk 2. Embung Songkar Moyo Utara 3. Embung Lamenta Empang 4. Embung Sepayung 5. Embung Sebate Desa POTO

4. Pendapatan Asli Daerah Dinas Kelautan Dan Perikanan

Pendapatan Asli Daerah dari sektor Kelautan dan Perikanan terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat pelelangan ikan, dan retribusi produksi usaha daerah. Capaian masing-masing retribusi Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.23 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Perikanan
Tahun 2020 – 2024

No	Jenis Penerimaan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	200.000.000	200.000.000	200.000.000	150.000.000	172.868.900
	- Balai Budidaya Ikan Pantai (BBIP) Meno	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	171.500.000
	- Cold Storage dan pabrik es Tanjung Pengamas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	-
	- Retribusi sewa bangunan depo pemasaran	-	-	-	-	1.368.900
2	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	16.514.000	21.464.000	21.631.000	21.982.000	33.314.000
	- Retribusi Kapal Perikanan (PPI Tjg. Pengamas)	3.021.000	3.406.000	5.091.000	5.635.000	8.109.000
	- Retribusi Orang (PPI Tjg. Pengamas)	4.690.000	7.843.000	8.344.000	7.609.000	12.216.000
	- Retribusi Motor (PPI Tjg. Pengamas)	3.719.000	5.783.000	3.186.000	3.058.000	5.206.000
	- Retribusi Mobil (PPI Tjg. Pengamas)	4.384.000	3.732.000	4.310.000	4.980.000	6.783.000
	- Retribusi Tambat Labuh Kapal Perikanan (TPI Lab. Bua)	700.000	700.000	700.000	700.000	1.000.000
3	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	170.200.000	192.650.000	103.212.600	123.045.000	130.814.000
	- Benih Ikan Karper (BBIAT)	32.850.000	40.000.000	26.400.000	32.870.000	28.250.000
	- Benih Ikan Nila Gift (BBIAT)	67.600.000	87.750.000	57.162.600	66.800.000	76.564.000
	- Benih Ikan Tawes (BBIAT)	29.750.000	29.700.000	19.650.000	23.375.000	26.000.000
	- Produksi Udang (Tambak Percontohan)	40.000.000	35.200.000	-	-	-
	JUMLAH	386.714.000	414.114.000	324.843.600	295.027.000	336.996.900

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan data diatas dapat dilihat realisasi Pendapatan Asli Daerah sektor Perikanan mengalami penurunan pendapatan pada tahun 2023 dikarenakan dukungan dari kegiatan restocking Dinas Kelautan dan Perikanan yang mensupport pendapatan pada retribusi penjualan produksi usaha daerah sangat kecil, serta perusahaan yang menyewa *cold storage* dan pabrik es di tanjung pengamas melakukan pemutusan kontrak, tetapi belum membayar sewa tersebut penggunaan bangunan dan fasilitas tersebut.



Gambar 2.19 Realisasi PAD Sektor Perikanan Tahun 2020-2025

Berdasarkan Gambar 2.15 diatas dapat dilihat Retribusi tempat Pelelangan Ikan memiliki kontribusi yang rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Kelautan dan Perikanan. Hal Ini menunjukkan belum optimalnya pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) maka perlu dilakukan Peningkatan fasilitas lelang, kebersihan, penyimpanan dingin, dan teknologi digitalisasi sistem lelang.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sumbawa

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa memiliki kewajiban melakukan layanan kepada masyarakat meliputi:

- 1. Pelaku usaha perikanan budidaya baik perorangan maupun kelompok.
- 2. Pelaku usaha perikanan tangkap baik perorangan maupun kelompok
- 3. Pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan baik perorangan maupun kelompok,
- 4. Kelompok masyarakat pengawasan perikanan,

Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, terdapat beberapa jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan pengurusan dokumen kelautan dan perikanan, yaitu:

- 1. Pelayanan kepelabuhanan terdiri dari layanan tambat labuh kapal perikanan, parkir pelabuhan, dan penyewaan sarana dan prasarana pelabuhan;
- 2. Pelayanan penyediaan benih ikan air tawar yang dilaksanakan oleh Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) Rhee;
- 3. Pelayanan penyediaan benih udang yang dilaksanakan oleh Balai Benih Ikan (BBI) Meno;
- 4. Penerbitan rekomendasi Ijin Usaha Perikanan Budidaya, rekomendasi Ijin Usaha Penangkapa Ikan, pencatatan tanda daftar kapal perikanan, dan rekomendasi BBM, dan penerbitan Surat Keterangan Pengiriman Hasil Perikanan (SKPHP);

5. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pengiriman Benih Bening Lobster (BBL).

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa dalam pemberian pelayanan sebagai berikut :

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia,
2. Agraria dan Tata ruang/BPN,
3. Badan Riset dan Inovasi Nasional,
4. Balai Konservasi Sumber Daya Alam,
5. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. NTB,
6. Dinas lingkungan Hidup Kab. Sumbawa,
7. Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa,
8. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Sumbawa,
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sumbawa,
10. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Sumbawa,
11. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumbawa
12. Kecamatan dan Pemerintah Desa Se Kabupaten sumbawa
13. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa,
14. Pertamina
15. Perusahaan Listrik Negara,
16. Perguruan tinggi
17. Beberapa organisasi non pemerintahan (NGO) diantaranya: *Wildlife Conservation Society* (WCS), Yayasan Konservasi Indonesia (YKI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) serta Bentang, Shrimp Club Indonesia (SCI)

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten sumbawa yang tugas dan fungsinya sebagai pelaksana tugas dan pengambil kebijakan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Kebijakan dan strategi pada sektor kelautan dan perikanan ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan serta mutu dan kualitas hasil kelautan dan perikanan baik segar maupun olahan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa menghadapi beberapa masalah yang mampu mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah. Permasalahan pembangunan adalah

penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang.

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan-permasalahan pembangunan bidang kelautan dan perikanan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.24 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
1	2	3		4	
1	Pengelolaan Kelautan dan Perikanan belum optimal	1	Produksi dan produktivitas perikanan budidaya yang belum optimal	1	• Kualitas SDM pembudidaya yang belum optimal • Teknologi pembudidayaan ikan yang belum optimal • Kualitas benih dan induk unggul yang belum optimal • Mahalnya harga pakan
		2	Produksi dan produktivitas perikanan Tangkap yang belum optimal	2	• Kualitas SDM nelayan yang belum optimal • Menurunnya stok sumber daya ikan • Teknologi penangkapan ikan yang belum optimal • Akses nelayan terhadap fasilitas penangkapan ikan yang belum optimal
		3	Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Bidang Perikanan yang belum optimal	3	• Belum optimalnya kesadaran nelayan, Pembudidaya Ikan serta Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan untuk mengurus dokumen administrasi Sesuai ketentuan yang berlaku
		4	Nilai tambah industri produk olahan dan pemasaran hasil perikanan yang berdaya saing yang belum optimal	4	• Kualitas Pengolahan yang belum optimal • Akses pasar Produk Kelautan dan Perikanan yang belum optimal • Kapasitas usaha pengolahan dan pemasaran yang belum optimal • Masih terbatasnya investasi yang bergerak dalam pemanfaatan dan Pengolahan hasil sumberdaya kelautan dan perikanan
2	Belum optimalnya Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Dinas Kelautan dan Perikanan	2	Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik belum berkualitas dan efektif.	2	- Belum optimalnya pengelolaan pemerintahan berbasis IT (information technology) - Rendahnya efisiensi, efektivitas serta akuntabilitas aparatur dalam tata kelola pemerintahan - Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya

yang signifikan bagi daerah. Isu strategis memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu-isu strategis diidentifikasi melalui kebijakan dan kegiatan pembangunan masa lalu yang mempengaruhi visi, misi, output, biaya dan atau manajemen. Cara mengidentifikasi dan memilih selanjutnya mempengaruhi keputusan bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa melakukan perencanaan, realisasi dan pengawasan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Tabel 2.25 Isu Strategis Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pelayanan Perangkat Daerah	Pelayanan Publik belum sepenuhnya efektif dan efisien, ditandai dengan pemanfaatan IT (teknologi informasi) belum optimal. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik belum berkualitas dan efektif.	Lemahnya Penegakan Hukum, Birokrasi, dan Pelayanan Publik Sistem birokrasi yang kurang efektif, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kualitas pelayanan publik menghambat tata kelola pemerintahan yang baik.	Tantangan pelayanan pemerintahan yang membutuhkan adaptasi dan inovasi., Peningkatan kualitas pelayanan publik pengembangan SDM, penerapan teknologi, dan penguatan <i>goodgovernance</i> Adanya berbagai standar global untuk menilai birokrasi dari suatu instansi, Misalnya <i>Global Competitiveness Index, Open Government Index, Ease of Doing Business, Worldwide Government Indicators (WGI), Bureaucracy Index, dan Government effectiveness Index</i>).	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan: Transformasi digital layanan publik, peningkatan indeks reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, karena belum sepenuhnya terbangun integrasi sistem layanan publik. Desain organisasi perangkat daerah masih asimetris/belum bersifat afirmatif terhadap permasalahan dan prioritas Pembangunan daerah.	Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi: Peningkatan efektivitas dan efisiensi layanan publik, optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Akselerasi transformasi digital: Peningkatan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik, ekonomi, pendidikan, serta integrasi sistem digital dalam pemerintahan daerah.	Efektivitas dan efisiensi pelayanan publik berbasis teknologi informasi belum optimal Implementasi manajemen kinerja dan akuntabilitas publik belum berjalan optimal
Perekonomian (Productivity, P4)	Pengelolaan Kelautan dan Perikanan belum optimal	Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi → Ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi, lapangan pekerjaan	Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan: Overfishing masih menjadi ancaman besar; 1 dari 3 stok ikan laut dunia telah dieksploitasi berlebihan. Meningkatnya kebutuhan akan pendekatan Ecosystem-Based Fisheries Management (EBFM) dan penetapan Total Allowable Catch (TAC) berdasarkan data ilmiah.	Hilirisasi industri dan peningkatan daya saing ekonomi : Pengembangan industri berbasis sumber daya alam, peningkatan nilai tambah sektor Perikanan Implementasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT): Salah satu program prioritas KKP (2023–2025) yang bertujuan menjaga stok ikan tetap lestari sekaligus	Pembangunan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas sektor ekonomi non tambang: Diversifikasi ekonomi dengan mendorong sektor pertanian, perikanan, manufaktur, serta ekonomi kreatif.	Produksi/ Produktivitas Kelautan dan Perikanan produk unggulan belum optimal. Belum optimalnya infrastruktur bidang perikanan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
			Pemberantasan IUU Fishing (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing) Praktik IUU menyebabkan kerugian lebih dari US\$20 miliar/tahun dan mengancam ketahanan pangan, ekonomi, dan kedaulatan laut negara berkembang. Inovasi Pendanaan dan Teknologi Biru (Blue Finance & Blue Tech): Munculnya blue bond, blue carbon, dan ESG investment untuk proyek konservasi laut dan perikanan berkelanjutan.	meningkatkan nilai tambah nasional.. Peningkatan produktivitas sektor perikanan: Optimalisasi perikanan tangkap berkelanjutan. Kesejahteraan Nelayan & Pelaku Usaha Perikanan Kecil: Masih banyak nelayan dan pembudidaya hidup di bawah garis kemiskinan, dengan akses terbatas ke pembiayaan, teknologi, dan pasar. Penguatan Budidaya Ikan & Udang Berkelanjutan: Produksi perikanan budidaya (khususnya udang, nila, lele, bandeng) menjadi andalan peningkatan ekspor dan ketahanan pangan.		

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

Tujuan dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa. Tujuan jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilannya yang akan di pertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tujuan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 dapat diformulasikan sebagai berikut: **“Terwujudnya Peningkatan Produksi Sektor Perikanan Untuk Mendukung Industri/ Agroindustri dalam Perekonomian Wilayah”**.

Tabel 3.1 Tujuan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

No	Urusan	Tujuan	Indikator	Formulasi
1	Kelautan dan Perikanan	“Terwujudnya Peningkatan Produksi Sektor Kelautan dan Perikanan Untuk Mendukung Industri /agroindustri dalam Perekonomian Wilayah”.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHK) (%)	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan digunakan untuk menghitung persentase pertumbuhan ekonomi sektor Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan suatu wilayah dari satu periode ke periode berikutnya.
			Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN (Indeks)	Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN adalah ukuran standar untuk menilai sejauh mana NSPK Manajemen ASN telah diimplementasikan di sebuah instansi pemerintah. Hasilnya berupa skor 0–100, yang kemudian dikategorikan sebagai berikut: 85 - 100 : Sangat Baik 70 - 84 : Baik 55 - 69 : Cukup < 55 : Kurang
			Skor hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Angka)	Skor Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah nilai akhir yang menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan secara menyeluruh sesuai dengan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
			Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah (%)	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah adalah perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total Pendapatan Daerah dalam satu tahun anggaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan. Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kompetensi kinerja dan disiplin ASN Perangkat daerah,
2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Serta Evaluasi Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan
3. Meningkatnya Retribusi Sub Sektor Kelutan dan Perikana
4. Meningkatnya Produksi Usaha Perikanan
5. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha Kelautan dan Perikanan terhadap peraturan

Secara rinci target kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung sasaran pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa disajikan pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3. berikut.

Tabel 3.2. Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi
Terwujudnya Peningkatan Produksi Sektor Kelautan dan Perikanan Untuk Mendukung Industri/agroindustri dalam Perekonomian Wilayah		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan (ADHK)		
	Sasaran 1 : Meningkatnya kompetensi, kinerja dan disiplin ASN PD	Indikator Sasaran 1 Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN PD	Kategori	Tingkat IPASN: merupakan kategori IPASN yang menjadi ukuran kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN untuk penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN, dengan kriteria yaitu: 91-100 : Sangat Tinggi 81-90 : Tinggi 71-80 : Sedang 61-70 : Rendah 60 ke bawah : Sangat Rendah.
	Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja serta Evaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Indikator Sasaran 2 Kategori AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	Kategori	Kategori SAKIP: Merupakan kategori kualitas SAKIP yang menjadi gambaran implementasi akuntabilitas kinerja, dengan kategori yaitu: AA (> 90 – 100) : Sangat Memuaskan A (> 80 – 90) : Memuaskan BB (> 70 – 80) “ Sangat Baik B (> 60 - 70) : Baik CC (> 50 – 60) : Cukup (Memadai) C (> 30 – 50) : Kurang D (> 0 – 30) : Sangat Kurang <u>Catatan:</u> Kategori AKIP secara reguler diukur dan dirilis oleh Inspektorat Daerah.
	Sasaran 3 : Meningkatnya Retribusi Sub Sektor Kelautan dan Perikanan	Indikator Sasaran 3 Proporsi retribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap retribusi daerah (%)	%	Proporsi retribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap retribusi daerah adalah perbandingan antara total retribusi yang diperoleh dari kegiatan sektor kelautan dan perikanan dengan total retribusi daerah secara keseluruhan. Rumus Perhitungan : $\text{Proporsi Retribusi Sektor Perikanan} = \frac{\text{Retribusi Sektor Perikanan}}{\text{Total Retribusi Daerah}} \times 100\%$

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi
	Sasaran 4 : Meningkatnya produksi Usaha Sektor Perikanan	Indikator Sasaran 4 Laju Peningkatan Produksi Perikanan	%	Laju Peningkatan Produksi Perikanan: secara umum mengukur seberapa cepat produksi sektor perikanan meningkat dalam kurun waktu tertentu. Rumus Perhitungan : $\text{Laju Pertumbuhan Produksi} = \left(\frac{\text{Produksi Tahun ke-}n - \text{Produksi Tahun ke-}(n-1)}{\text{Produksi Tahun ke-}(n-1)} \right) \times 100\%$
	Sasaran 5 : Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan	Indikator Sasaran 5 Persentase pelaku usaha yang dinilai patuh terhadap regulasi (berdasarkan hasil audit/monitoring)	%	Persentase pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan (penangkapan, budidaya, pengolahan, distribusi, dll.) yang telah diaudit/di-monitoring dan memenuhi ketentuan regulasi sesuai standar teknis, perizinan, dan tata kelola usaha. Rumus Perhitungan : $\text{Persentase Kepatuhan} = \left(\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang patuh}}{\text{Jumlah pelaku usaha yang diaudit/di-monitoring}} \right) \times 100\%$

Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kelautan dan Perikanan											
- Meningkatkan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan Daerah - Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah - Meningkatkan kualitas dan profesionalitas aparatur sipil negara dalam bertugas - Meningkatkan produktivitas sektor primer daerah non tambang	Terwujudnya Peningkatan Produksi Sektor Kelautan dan Perikanan Untuk Mendukung Industri /agroindustri dalam Perekonomian Wilayah		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHK) (%)	1,30	1,29	1,28	1,27	1,26	1,22	1,20	
			Indeks Implementasi NSPK Manajemen Aparatur Sipil Negara (Indeks)	76,54	79,61	82,81	86,13	89,58	93,18	96,92	
			Skor hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Angka)	3,417	3,427	3,437	3,447	3,457	3,467	3,477	
			Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah (%)	13,06	10,07	10,48	10,59	10,62	10,55	10,47	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
		Meningkatnya kompetensi, kinerja dan disiplin ASN PD	Kategori Indeks Profesionalitas ASN PD (Kategori)	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja serta Evaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Kategori AKIP PD (Kategori)	A	A	A	A	A	A	A	
		Meningkatnya produksi Usaha Sektor Perikanan	Laju Peningkatan produksi Perikanan (%)	-	2,00	2,06	2,11	2,15	2,2	2,24	
		Meningkatnya Retribusi Sub Sektor Kelautan dan Perikanan	Proporsi retribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap retribusi daerah (%)	3,13	0,32	0,31	0,28	0,25	0,23	0,2	
		Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan	Persentase pelaku usaha yang dinilai patuh terhadap regulasi (berdasarkan hasil audit/monitoring) (%)	-	75	75	75	75	75	75	

3.2 Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

Untuk mempercepat implementasi dan konsistensi visi, misi, tujuan dan sasaran dalam proses pembangunan daerah, perlu dikembangkan strategi dan arah kebijakan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah, terpadu dan berkesinambungan. Strategi adalah pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau memperkuat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun dan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya, diperlukan pedoman berupa arah kebijakan.

Strategi merupakan rangkaian tahapan yang berisi *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Tabel 3.4. Sasaran dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa

NO	Optimalisasi NSPK	Sasaran PD	Strategi
1	Meningkatnya kualitas dan profesionalitas aparatur sipil negara dalam bertugas	Meningkatnya kompetensi, kinerja dan disiplin ASN PD	Peningkatan Profesionalitas ASN PD
2	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja serta Evaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja PD
3	Meningkatnya efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan Daerah	Meningkatnya Retribusi Sub Sektor Kelautan dan Perikanan	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor perikanan
4	Meningkatnya produktivitas sektor primer daerah non tambang	Meningkatnya produksi Usaha Sektor Perikanan	Peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap serta kapasitas sumberdaya manusia
			Peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya serta kapasitas sumberdaya manusia
			Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
		Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan	Peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan
			Meningkatkan pembinaan pengawasan SDKP

Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan Kepala Daerah. Tahapan pembangunan ini disajikan untuk keseluruhan periode RPJMD (tahun 2025-2029) dan satu tahun masa transisi di akhir periode. Penahapan pembangunan secara umum dan masing-masing misi serta tujuan pembangunan disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.5. Penahapan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan

Tujuan	TAHAP 1 (2025)	TAHAP 2 (2026)	TAHAP 3 (2027)	TAHAP 4 (2028)	TAHAP 5 (2029)	TRANSISI (2030)
	Tata Kelola & RB: SOP layanan publik di Dinas Kelautan dan Perikanan, ePlanning & eBudgeting awal	E-Gov (e-SAKIP) lebih sempurna, naikan peringkat SAKIP OPD	Target Nilai "A" SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	Target Nilai "A" SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan min. "A" (SAKIP), e-Gov terintegrasi (SPBE).	Mengintegrasikan semua hasil reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan upaya peningkatan kapasitas fiskal yang telah dicapai.
Meningkatnya Produksi Kelautan Perikanan	Pengelolaan Perikanan Tangkap : Penguatan Basis Data dan Kelembagaan Fokus: Menyediakan dasar yang kuat untuk peningkatan produksi	Pengelolaan Perikanan Tangkap : Penataan Tata Kelola dan Sarana Produksi Fokus: Meningkatkan produktivitas melalui tata kelola dan dukungan sarana dan Prasarana yang memadai	Pengelolaan Perikanan Tangkap : Peningkatan kapasitas produksi dan hilirisasi Fokus : meningkatkan hasil tangkapan Komoditas Penting (Tuna, Cakalang, Kerapu, Kakap, Tenggiri) dan efisiensi rantai pasok	Pengelolaan Perikanan Tangkap : Penguatan rantai nilai dan diversifikasi produk Fokus : Meningkatkan nilai tambah produksi	Pengelolaan Perikanan Tangkap : Evaluasi kinerja dan replikasi model berhasil Fokus : Menilai capaian dan memperluas dampak	Konsolidasi capaian, Sinkronisasi kebijakan baru, Penyusunan Renstra tahap berikutnya berbasis evaluasi hasil produksi, Konsolidasi data produksi nasional/regional, Sinkronisasi arah kebijakan dengan RPJMN dan Renstra KKP terbaru.
	Pengelolaan Perikanan Budidaya : Penguatan pondasi dan validasi data Fokus : Penataan basis data, wilayah dan pelaku usaha budidaya	Pengelolaan Perikanan Budidaya : Peningkatan kapasitas sarana dan prasaran Fokus : Penyediaan infrastruktur dan input produksi	Pengelolaan Perikanan Budidaya : Ekspansi produksi dan penerapan teknologi Fokus : Peningkatan skala usaha dan efisiensi produksi	Pengelolaan Perikanan Budidaya : Hilirisasi, sertifikasi dan akses pasar Fokus : Peningkatan nilai tambah dan daya saing	Pengelolaan Perikanan Budidaya : Evaluasi, replikasi, dan ketahanan usaha Fokus : Konsolidasi capaian, replikasi keberhasilan, dan keberlanjutan usaha	

Tujuan	TAHAP 1 (2025)	TAHAP 2 (2026)	TAHAP 3 (2027)	TAHAP 4 (2028)	TAHAP 5 (2029)	TRANSISI (2030)
	Pengawasa n Sumber Daya Kelautan dan Perikanan : Penguatan dasar system pengawasa n Fokus : Penyusuna n system pengawasa n berbasis data dan kelembagaa n	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan : Penataan system dan perluasan jangkauan pengawasan Fokus : Operasionila si pengawasan secara aktif dan responsif	Pengawasa n Sumber Daya Kelautan dan Perikanan : Integrasi teknologi dan pemnataua n berbasis data Fokus : Efisiensi pengwasan a berbasis digital	Pengawasa n Sumber Daya Kelautan dan Perikanan : Pencegahan , edukasi dan keteladana n Fokus : Membangu n kesadaran hukum dan budaya pengawasa n	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan : Evaluasi, reformasi strategi dan penguatan hukum Fokus : Menjamin kesinambun gan hasil pengawasan untuk produksi yang optimal	
	Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Penguatan data, infrastrukt ur asar dan kelembagaa an Fokus : Persiapan awal untuk menjamin ketersediaa n sarana dan basis data pemasaran	Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Peningkatan mutu produk dan system rantai dingin Fokus : Menekan kehilangan hasil (loss) dan memperpanj ang daya simpan	Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Diversifikas i produk dan pemasaran inovatif Fokus : Menambah nilai dan jangkauan pasar	Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Ekspansi pasar dan kemitraan Fokus : Meningkatk an skala dan nilai ekspor produk perikanan	Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Evaluasi, Replikasi model usaha sukses dan keberlanjuat an.	

3.3 Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Sumbawa disusun secara komprehensif agar dapat mencapai tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Sumbawa. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. Untuk mewujudkan hal tersebut arah kebijakan dibuat untuk mengarahkan rumusan strategi yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan. Arah kebijakan dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan daerah serta seiring dengan strategi untuk setiap sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Operasionalisi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
1	Tata Kelola Managerial dan penajaman Reformasi Birokrasi PD	Pelatihan fungsional & teknis sesuai kebutuhan strategis OPD	Internalisasi budaya kerja berorientasi Kinerja pada seluruh level pegawai.	
		Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di tiap OPD	Penguatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja	
			Penetapan indikator kinerja program dan kegiatan dinas yang terukur, relevan, dan mendukung capaian sasaran pembangunan ekonomi daerah.	
		Revisi Perda pajak & retribusi agar ramah pelaku usaha.	Peninjauan dan penyesuaian tarif retribusi jasa usaha perikanan	
		Peningkatan pengelolaan aset daerah (sewa, kemitraan) untuk PAD.	Pelatihan aparatur dalam pengelolaan PAD sektor perikanan	
2	Optimalisasi Tata Kelola Sektor Kelautan dan Perikanan	Mendorong korporatisasi petani/nelayan(B UMDes, co-op).	Penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap	
			Peningkatan Kapasitas Nelayan Kecil	
			Pemberian Fasilitas Bantuan Pendanaan Bantuan Pembiayaan Kemitraan Usaha	
		Benih Unggul Perikanan	Penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya	

No	Operasionalisi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
		Mendorong korporatisasi petani/nelayan(B UMDes, co-op).	Peningkatkan kapasitas (pembinaan, pelatihan dan Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi) pembudidaya ikan skala kecil	
			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Peningkatan layanan rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	
		Promosi hasil pertanian unggulan (pameran, ecommerce).	Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	
			Pelaksanaan pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk skala mikro dan skala usaha kecil	
			pelatihan pengolahan bagi pelaku usaha pengolahan hasil perikanan	
			Fasilitasi akses pasar dan promosi produk olahan hasil perikanan	
			Pelatihan teknis bagi pengawas perikanan	
			penyediaan sarana pengawasan bagi pengawas perikanan	

No	Operasionalisi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
			Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku	
			Penertiban penerapan regulasi usaha kelautan dan perikanan	

Pola hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara umum UU tersebut mengamanatkan bahwa dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pembangunan kabupaten/kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan provinsi, serta pembangunan provinsi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Dengan demikian rencana pembangunan Nasional merupakan pedoman bagi rencana pembangunan Provinsi, serta rencana pembangunan Provinsi merupakan pedoman bagi rencana pembangunan Kabupaten/Kota. Rencana Pengembangan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten sumbawa yang tentuang dalam RPJMN 2025-2029 Dapat dilihat dalam tabel di Bawah ini:

Tabel 3.7 Rencana Pembangunan Kelautan dan Perikanan Sumbawa yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029

No	LOKPRI	FOKUS PRIORITAS	INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
1	Sentra Produksi Berbasis Komoditas Udang	Pengembangan sentra akuakultur kuhususnya Udang	Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat di Kabupaten Sumbawa	Benih udang
				Klaster kawasanrevitalisasi tambak udang
				Sarana pengolahan hasil KP
				Sarana penyimpanan produk kp
				Sarana distribusi logistik produk kp
			Pengembangan akuakultur komoditas udang	Breeding program induk unggul
				Penataan jaringan irigasi dan revitalisasi lahan tambak udang dengan prioritas tambak tradisional plus
				Pengerukan muara sungai yang mengalami sedimentasi
				Penyederhanaan perizinan lintas sektor

No	LOKPRI	FOKUS PRIORITAS	INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
				Peningkatan mutu produk serta perluasan pasar ekspor
2	Kawasan Perikanan dan Sentra Rumput Laut (B14)	Sentra Budidaya dan Hilirisasi rumput laut	Jaminan ketersediaan bahan baku industri rumput laut	Peningkatan kualitas bahan baku
				Kluster rumput laut berbasis Kawasan yang dibangun masyarakat
				Pengembangan teknologi dan pembibitan
			Hilirisasi, peningkatan rantai nilai, promosi dan penguatan sumber daya manusia	Fasilitasi investasi hilirisasi industri
				Penguatan kapasitas pembudidaya rumput laut
				Pengembangan pangan dan biostimulan berbasis rumput laut
				Dukungan pembiayaan
				Rekomendasi tata kelola bidang budidaya rumput laut dan kewirausahaan pemuda
				Memperkuat koperasi rumput laut
				Pengembangan jaringan infrastruktur pengolahan di dekat sentra produksi rumput laut
			Peningkatan kualitas dan ketersediaan bahan baku melalui peningkatan produktifitas budidaya rumput laut	Bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat
				Sarana budidaya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat
				Infrastruktur kawasan budidaya rumput laut - Ocean for Prosperity- Infrastructure for Coral Reef Areas
			Pengembangan industri dan hilirisasi rumput laut	Pengembangan hilirisasi industri pengolahan hasil laut dan perikanan
			Fasilitasi pembiayaan dan investasi serta penelitian	Pembiayaan
				Investasi
				Penelitian
			Pengembangan budidaya rumput laut spesies baru dan inovasi teknologi	Diversifikasi produk rumput laut; karagenan, agar-agar, biostimulan, nutrasetikal, pakan ternak
3	Pengembangan Kawasan	Kawasan prioritas pengembangan	Pengembangan kelembagaan dan sarpras produk perikanan	Identifikasi potensi sosbud dan kelembagaan setiap lokasi untuk

No	LOKPRI	FOKUS PRIORITAS	INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
	Sentra Berbasis Perikanan Tangkap	kelautan dan perikanan pada sentra Berbasis Perikanan Tangkap	tangkap serta kampung/sentra Nelayan	pengembangan sesuai karakter lokal
				Mendorong ownership nelayan pada aset dan lembaga yang telah dibentuk
				Fasilitasi dan penguatan kelembagaan nelayan penguatan pendanaan
				integrasi program K/L terkait (a.l: Kementerian PUPR, Kementerian Koperasi, Ketnenterien UMKM, Kementerian ESDM) sebagai percontohan dan potensi replikasi; kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya; alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan
			Pengembangan industri pengolahan ikan	pembangunan unit pengolahan ikan (UPI)
				Sarana pengolahan hasil KP
				Sarana penyimpanan produk KP
				Sarana distribusi logistik produk KP
4	Kawasan Sentra Garam Rakyat	Sentra Garam Rakyat	Pengembangan garam industri terintegrasi	Korporasi petambak garam
				verifikasi penyaluran dan distribusi garam industri ke industri
				fasilitasi pendampingan pelaku usaha komoditas yang siap edar
				peningkatan kualitas garam yang memenuhi standard garam industri
				Bantuan sarana pengembangan usaha petambak garam industri
				Pendampingan industri pengolahan garam dalam negeri dalam pemenuhan spesifikasi industri aneka pangan, farmasi dan kosmetik
			Penguatan sarpras industri garam	lahan garam yang difasilitasi
				sarana niaga garam rakyat yang diserahkan ke masyarakat/pemda

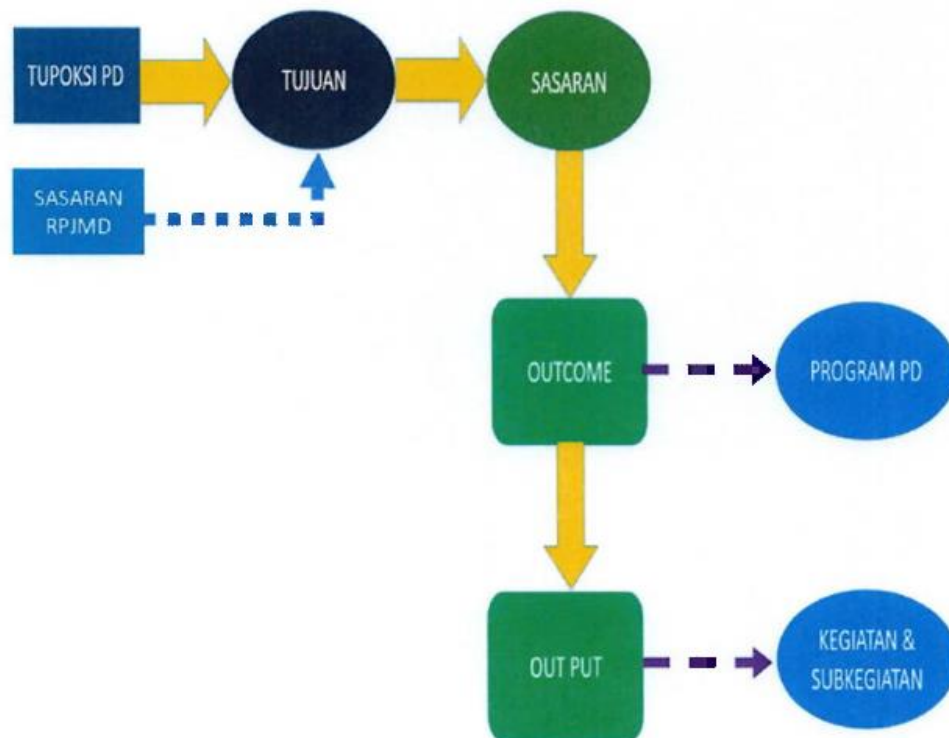
No	LOKPRI	FOKUS PRIORITAS	INDIKASI INTERVENSI	OUTPUT
			Peningkatan produktifitas garam rakyat	Pengadaan sarpras produksi garam
				pengembangan korporasi petambak garam

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Serta Kinerja, Indikator, Target, Dan Pagu
Indikatif

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif. Program Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan program prioritas yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumbawa Tahun 2025 - 2029 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program per pagu sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPD, yang selanjutnya dijabarkan Dinas Kelautan dan Perikanan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan atas strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan.



Gambar 4.1. Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra PD

Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output. Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2030 dapat dilihat Pada Tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1 Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN		TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
1	Meningkatnya kualitas dan profesionalitas ASN dalam bertugas	Terwujudnya Peningkatan Produksi Sektor Kelautan dan Perikanan Untuk Mendukung Industri/agroindustri dalam Perekonomian Wilayah				Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN (poin)		
			Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pelayanan PD			Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN PD		
				Meningkatnya Kompetensi, Kinerja, dan Disipin ASN PD		Indeks Profesionalitas ASN PD	X.XX.01 Penunjang Urusan Pemda Kab/Kota	
					Terlaksananya Administrasi Kepegawaian PD	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD (Dokumen)	X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	X.XX.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah					Skor hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Nilai)		
						Kategori AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan		
				Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta evaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan		Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	X.XX.01 Penunjang Urusan Pemda Kab/Kota	
					Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dinas Kelautan dan Perikanan	X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	
					Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	X.XX.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	X.XX.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	X.XX.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN		TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
					Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	X.XX.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	X.XX.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Terlaksananya Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	X.XX.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PD	
					Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup PD	X.XX.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	
					Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan PD
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	X.XX.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
					Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	X.XX.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Meningkatnya kualitas manajemen penatausahaan BMD Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Administrasi BMD pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang disusun	X.XX.01.2.03 Administrasi BMD pada PD	
					Tersedianya Rencana Kebutuhan BMD SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan BMD SKPD	X.XX.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	
					Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	X.XX.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN		TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
3	Meningkatnya efektifitas				Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Administrasi Umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum PD	
					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	X.XX.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	X.XX.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	X.XX.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang disusun	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	X.XX.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	X.XX.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	X.XX.01.2.09.0010 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
3	Meningkatnya efektifitas					Proporsi PAD terhadap		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN		TUJUAN	SASARAN	OUTCOME		OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
	pengelolaan sumber daya keuangan Daerah						pendapatan daerah (%)		
							Laju PAD sektor Perikanan		
				Meningkatnya Retribusi Daerah			PAD sektor Perikanan	X.XX.01 Penunjang Urusan Pemda Kab/Kota	
						Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD yang disusun	3.25.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	
						Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3.25.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
4	Meningkatnya produktivitas sektor primer Daerah non tambang						Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan (ADHK)		
			Meningkatnya Produksi Usaha Sektor Perikanan				Laju Peningkatan Produksi Perikanan		
				Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap			Laju Produksi Perikanan Tangkap	3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
						Tersedianya sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap di perairan umum	Jumlah sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap di perairan umum (unit)	3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
						Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
						Terbinanya Nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/kota	Jumlah nelayan kecil yang terbina (Orang)	3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	3.25.03.2.02.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
						Terkelolanya Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah TPI yang dikelola (unit)	3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN		TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
					Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
					Terbitnya Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Dokumen Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) (Rekomendasi)	3.25.03.2.04 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Diterbitkannya Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	3.25.03.2.04.0002 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	
				Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya		Laju Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
					terlaksananya penerbitan sertifikat Standar	Jumlah Rekomendasi sertifikat Standar yang terbit	3.25.04.2.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Terlayannya Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Melalui Penerbitan Rekomendasi Teknis	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	3.25.04.2.01.0002 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	
					Terlaksananya Pemberdayaan Pembudidaya ikan kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil laki-laki dan perempuan yang memperoleh pemberdayaan (kelompok)	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti	3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN		TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
					Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
					Terbitnya sertifikasi Standar bagi pembudidaya ikan kecil	jumlah Sertifikat Standar bagi pembudidaya ikan Skala Kecil/ yang diterbitkan (Dokumen)	3.25.04.2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Terlayannya Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	3.25.04.2.03.0002 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pembudidayaan ikan yang dimanfaatkan/ terbangun /terehabilitasi	3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04.0008 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan		Laju Produksi Olahan Hasil Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
					Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah unit usaha yang memiliki rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (Unit Usaha)	3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN		TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
							Usaha Skala Mikro dan Kecil	
					Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3.25.06.2.01.0003 Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
					Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
					Terlaksananya Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
					Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Jumlah angka konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Meningkatnya Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan			Persentase pelaku usaha yang dinilai patuh terhadap regulasi (berdasarkan hasil audit/monitoring)		
				Meningkatnya Pengawasan terhadap usaha pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan		Cakupan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang terawasi Berdasarkan	3.25.05. Pengawasan Sumbaerdaya Kelautan dan Perikanan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN		TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
						Kewenangan Kabupaten		
					Terlaksanannya Pemeriksaan Pelaku usaha perikanan sesuai Kewenangan	Jumlah pelaku usaha perikanan yang diperiksa sesuai kewenangan kabupaten/kota	3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
					Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	3.25.05.2.01.0004 Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
					Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	3.25.05.2.01.0006 Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
					Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan enangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	3.25.05.2.01.0007 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
					Perkara sanksi administratif bidang kelautan yang memiliki izin di wiilayah kabupaten/kota yang ditangani	Jumlah perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin di wilayah kabupaten/kota yang ditangani	3.25.05.3.02.0001 Perkara sanksi administratif bidang perikanan izin kabupaten/kota	

Adapun implemetasi pelaksanaan tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang mendukung capaian keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan akan dilaksanakan dengan program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program pada urusan penunjang perangkat daerah adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah program yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan yang mencakup berbagai aspek, mulai dari administrasi umum hingga pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap adalah salah satu program dalam urusan kelautan dan perikanan yang bertujuan untuk mengelola sumber daya ikan secara berkelanjutan melalui penangkapan ikan yang legal, teratur, dan bertanggung jawab, serta mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan. Program ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kegiatan penangkapan ikan, termasuk sarana dan prasarana yang mendukung serta peningkatan kapasitas pelaku utama (nelayan) dan pelaku usaha di bidang penangkapan ikan.

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya adalah program yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan budidaya ikan secara berkelanjutan, efisien, dan ramah lingkungan guna mendukung ketahanan pangan, peningkatan pendapatan pembudidaya, serta menjaga kelestarian ekosistem perairan. Program ini mencakup pengelolaan kegiatan budidaya ikan air tawar, air payau, dan air laut yang meliputi produksi, penyediaan sarana-prasarana, penyuluhan dan pendampingan pembudidaya, pengendalian penyakit ikan, serta penguatan kelembagaan pelaku utama budidaya.

4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan program strategis dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dari aktivitas pemanfaatan yang merusak, ilegal, dan tidak berkelanjutan. Program ini penting untuk mendukung keberlanjutan usaha perikanan serta perlindungan ekosistem laut dan pesisir. Program ini mencakup upaya pengawasan, penegakan hukum, pemantauan, serta edukasi dan penyadaran hukum terhadap pelaku usaha kelautan dan perikanan agar menjalankan kegiatan yang sesuai dengan peraturan dan prinsip keberlanjutan.

5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan adalah bagian penting dari pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, serta akses pasar produk perikanan. Program ini mendukung keberlanjutan usaha nelayan dan pembudidaya melalui pengolahan hasil tangkapan dan budidaya menjadi produk bernilai jual tinggi.

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah untuk merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit organisasi untuk mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa yang bersesuaian dengan uraian program dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050/5889 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas keputusan Hasil Verifikasi, Validasi Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta dengan memperhatikan tujuan dan sasaran, serta IKU dan

IKD/IKK dari Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, maka uraian kegiatan disajikan pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2. Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sumbawa

No.	Program	Kegiatan	Uraian operasional Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah (jangka menengah, tahunan, semesteran maupun bulanan) dan evaluasi kinerja perangkat daerah meliputi : Renstra, Renja perangkat daerah, RKA/perubahan RKA, DPA/ perubahan DPA, Pelaporan (LKjIP, laporan monev, laporan urusan pemerintahan, laporan lainnya) <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada seluruh unit perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam menyusun perencanaan dan penganggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa setiap tahun. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa
		b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<u>Nams Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan rangkaian proses administrasi keuangan perangkat daerah meliputi : menyediakan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, dan penyusunan laporan keuangan SKPD (bulanan/ triwulanan/ semesteran) <u>Lokasi Kegiatan :</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.

No.	Program	Kegiatan	Uraian operasional Kegiatan
			<u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam memastikan berjalannya seluruh administrasi keuangan secara lancar dan akuntabel untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN, administrasi pelaksanaan tugas ASN serta pelaporan keuangan SKPD (bulanan/ triwulanan/ semesteran/ tahunan). <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.
		c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan administrasi BMD perangkat daerah meliputi perencanaan kebutuhan BMD SKPD <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam memastikan berjalannya seluruh administrasi BMD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.
		d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan administrasi Kepegawaian perangkat daerah meliputi perencanaan dan evaluasi kebutuhan Pegawai SKPD <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam memastikan berjalannya seluruh administrasi kepegawaian

No.	Program	Kegiatan	Uraian operasional Kegiatan
			Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.
		e. Administrasi Umum Perangkat Daerah	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan administrasi umum perangkat daerah meliputi penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan, fasilitasi kebutuhan pelayanan Kunjungan Tamu kedinasan, fasilitasi pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD baik dalam daerah maupun luar daerah oleh pimpinan dan aparatur lainnya. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam memastikan berjalannya seluruh administrasi umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa dalam pelaksanaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan, fasilitasi kebutuhan pelayanan kunjungan tamu kedinasan, fasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi/konsultasi SKPD baik dalam daerah maupun luar daerah oleh pimpinan dan aparatur lainnya. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.
		f. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah meliputi: pelaksanaan penyediaan kebutuhan jasa surat menyurat, penyediaan kebutuhan jasa komunikasi/Sumber Daya Air/ Listrik kantor, penyediaan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan kebutuhan jasa pelayanan umum kantor. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029.

No.	Program	Kegiatan	Uraian operasional Kegiatan
			<u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam memastikan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa berjalan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.
		g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan meliputi: penyediaan kebutuhan jasa/biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas. Tujuannya menyediakan kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu unit kerja bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam hal kebutuhan jasa/biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan jabatan <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.
		h. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan Administrasi pendapatan untuk penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan meliputi: perencanaan pendapatan daerah, penetapan dan pemungutan pendapatan daerah, pencatatan dan pembukuan pendapatan, pengawasan dan evaluasi penerimaan, koordinasi dengan perangkat daerah terkait. <u>Lokasi Kegiatan:</u>

No.	Program	Kegiatan	Uraian operasional Kegiatan
			Kegiatan ini dilaksanakan pada perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu BKAD, Bapenda, Inspektorat dan unit kerja bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat untuk meningkatkan PAD, mendukung perencanaan dan penganggaran yang akurat, transparansi pendapatan, memudahkan evaluasi dan pengambilan keputusan, meningkatkan pelayanan public, dan memperkuat kemandirian fiskal daerah. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota untuk menunjang program pengelolaan perikanan tangkap yang dilaksanakan yaitu penyediaan sarana usaha perikanan tangkap. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa pihak yaitu KKP, KLHK, DLH, pelaku usaha perikanan, Lembaga penelitian dan akademisi, LSM, NGO dan swasta. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini bermanfaat menjaga kelestarian SDI, meningkatkan kesejahteraan nelayan, mendukung kegiatan konservasi dan rehabilitasi ekosistem, meningkatkan ketersediaan data dan informasi ikan, mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan SDI, meningkatkan potensi wisata perairan. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.

No.	Program	Kegiatan	Uraian operasional Kegiatan
		b. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota untuk penunjang program pengelolaan perikanan tangkap yang dilaksanakan meliputi: pengembangan kapasitas nelayan kecil dan penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> KKP, pelaku usaha perikanan, Lembaga penelitian dan akademisi <u>Manfaat Kegiatan:</u> Meningkatkan produktivitas dan pendapatan nelayan, meningkatkan akses terhadap permodalan dan pasar, meningkatkan kapasitas SDM nelayan, penguatan kelembagaan nelayan, peningkatan kesejahteraan nelayan. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.
		c. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	<u>Nama Kegiatan:</u> Nama kegiatan ini adalah pengelolaan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk penunjang program pengelolaan perikanan tangkap yang dilaksanakan meliputi: pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan . <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dinas Kelautan dan Perikanan, UPTD TPI, Nelayan, Petugas Retribusi TPI, KUB. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Menjamin tata Kelola TPI, meningkatkan PAD, mendorong timbulnya ekonomi lokal. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.
		d. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa,	<u>Nama Kegiatan:</u> Nama kegiatan ini adalah penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah untuk penunjang program pengelolaan perikanan tangkap yang dilaksanakan adalah pelayanan

No.	Program	Kegiatan	Uraian operasional Kegiatan
		dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah	penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT . <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dinas Kelautan dan Perikanan, pemilik kapal, pemerintah desa/kelurahan, petugas pengukur kapal, UPTD, Nelayan, Petugas Retribusi TPI, KUB. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Legalitas dan kepastian hukum bagi nelayan, mendukung tertib administrasi dan pendataan nelayan. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	a. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Nama kegiatan ini adalah penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota untuk penunjang program pengelolaan perikanan budidaya. Yang dilaksanakan adalah pelayanan penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasinya, dan/atau manfaaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dinas Kelautan dan Perikanan, UPTD, DPMPTSP, Pelaku usaha, Tim Verifikasi lapangan. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Legalitas dan kepastian hukum bagi pembudidaya, mendukung tertib administrasi dan pendataan pembudidaya. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.
		b. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	<u>Nama Kegiatan:</u> Nama kegiatan ini adalah pemberdayaan pembudi daya ikan kecil untuk penunjang program pengelolaan perikanan budidaya. Yang

No.	Program	Kegiatan	Uraian operasional Kegiatan
			dilaksanakan adalah pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudi daya ikan kecil dan pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, UPTD, Pelaku Utama (pembudiya ikan), Pokdakan, Penyuluh perikanan, perbankan, PT, LSM, Lembaga riset, Pemerintah desa/kel. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Meningkatkan produksi dan pendapatan pembudidaya, meningkatkan kapasitas dan pengetahuan teknis, meningkatkan akses terhadap pasar, penguatan kelembagaan, menumbuhkan wirausaha baru di sector perikanan. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.
		c. Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Nama kegiatan ini adalah penerbitan tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil (tdpik) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota untuk penunjang program pengelolaan perikanan budidaya. Yang dilaksanakan adalah pelayanan penerbitan tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota, Penyediaan data dan informasi pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, UPTD, Pelaku Utama (pembudiya ikan), Pokdakan, Penyuluh perikanan, PT, Lembaga riset, Pemerintah desa/kel. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Meningkatkan produksi dan pendapatan pembudidaya, meningkatkan kapasitas dan pengetahuan teknis, meningkatkan akses terhadap pasar, penguatan kelembagaan, menumbuhkan wirausaha baru di sector perikanan. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u>

No.	Program	Kegiatan	Uraian operasional Kegiatan
			Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.
		d. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	<u>Nama Kegiatan:</u> Nama kegiatan ini adalah pemberdayaan pembudi daya ikan kecil untuk penunjang program pengelolaan perikanan budidaya. Yang dilaksanakan adalah pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, UPTD, Pelaku Utama (pembudiya ikan), Pokdakan, Penyuluh perikanan, Pemerintah desa/kel. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Meningkatkan produksi dan pendapatan pembudidaya, meningkatkan kapasitas dan pengetahuan teknis, meningkatkan akses terhadap pasar, penguatan kelembagaan, menumbuhkan wirausaha baru di sektor perikanan. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.
		e. Pengelolaan Pembudidaya Ikan	<u>Nama Kegiatan:</u> Nama kegiatan ini adalah Pengelolaan Pembudidaya Ikan untuk penunjang program pengelolaan perikanan budidaya. Yang dilaksanakan adalah Penyediaan data dan informasi pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah, Penjaminan ketersediaan Sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, UPTD, Pelaku Utama (pembudiya ikan), Pokdakan, Penyuluh perikanan, Pemerintah desa/kel. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Meningkatkan produksi dan pendapatan pembudidaya, meningkatkan kapasitas dan

No.	Program	Kegiatan	Uraian operasional Kegiatan
			pengetahuan teknis, meningkatkan akses terhadap pasar, penguatan kelembagaan, menumbuhkan wirausaha baru di sektor perikanan. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.
4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.	a. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Nama kegiatan ini adalah pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota untuk penunjang program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Yang dilaksanakan adalah pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota, pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota dan pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kawenangan kabupaten/kota. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, UPTD, Pelaku Utama (pembudiya ikan), Pokdakan, KUB, Poklalsar Penyuluh perikanan, Pemerintah desa/kel. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Menjaga kelestarian sumber daya ikan, mencegah praktik penangkapan ikan yang merusak, mendukung keberlanjutan usaha perikanan, menegakkan peraturan dan kepatuhan hukum, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan sumber daya ikan, melindungi keanekaragaman hayati ikan. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.
		b. Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin di wilayah kabupaten/kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Nama kegiatan ini adalah penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin di wilayah kabupaten/kota untuk penunjang program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Yang dilaksanakan adalah perkara sanksi administrative bidang perikanan yang memiliki izin di wilayah kabupaten/kota yang ditangani. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan:</u>

No.	Program	Kegiatan	Uraian operasional Kegiatan
			Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, UPTD, Pelaku Utama (pembudiya ikan), Pokdakan, KUB, Poklahsar, Penyuluh perikanan, Pemerintah desa/kel. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Mendorong kepatuhan terhadap perizinan, menegakkan tata Kelola usaha perikanan yang baik, mencegah dan menindak pelanggaran secara tegas, melindungi sumber daya perikanan dan lingkungan, memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang tertib, mendukung tertib administrasi pemerintahan. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.
5	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	a. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	<u>Nama Kegiatan:</u> Nama kegiatan ini adalah Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil. Yang dilaksanakan adalah pelaksanaan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, UPTD, Poklahsar, Penyuluh perikanan, Pemerintah desa/kel. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Memfasilitasi pelaku usaha untuk memperoleh perizinan berusaha secara cepat dan tepat sesuai ketentuan yang berlaku. Membantu pelaku usaha memenuhi syarat teknis dan administrasi yang berkaitan dengan standar pengolahan dan pemasaran (seperti sanitasi, keamanan pangan, dan mutu). <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.
		b. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	<u>Nama Kegiatan:</u> Nama kegiatan ini adalah Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil. Yang dilaksanakan adalah Kegiatan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil

No.	Program	Kegiatan	Uraian operasional Kegiatan
			<u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, UPTD, Pelaku Utama (pembudiya ikan), Poklaksar, Penyuluh perikanan, Pemerintah desa/kel. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Menjamin keamanan dan mutu produk, meningkatkan daya saing produk di pasar, memenuhi syarat legalitas dan regulasi, mendorong profesionalisme dan disiplin produksi, memperbesar akses pasar dan peluang kemitraan, mendorong keberlanjutan usaha mikro dan kecil <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.
		c. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Nama kegiatan ini adalah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota. Yang dilaksanakan adalah fasilitasi penyediaan Bahan baku Industri Perikanan, Ikan Konsumsi serta Sarana dan Prasarana bagi pelaku usaha pengolahan ikan Skala Mikro <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, UPTD, Poklaksar, Penyuluh perikanan, Pemerintah desa/kel. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Menjamin keberlangsungan pasokan Bahan Baku produk perikanan, Meningkatkan kapasitas usaha pengolahan skala kecil dan menengah melalui ketersediaan bahan baku yang konsisten. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri di internal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.

4.2 Uraian Subkegiatan Berserta Indikator Kinerja, Target dan Pagu Indikatif

Pemetaan subkegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050/5889

Tahun 2021, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas keputusan Hasil Verifikasi, Validasi Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mendukung kegiatan sesuai tujuan dan sasaran, serta IKU dan IKD/IKK Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, maka uraian subkegiatan disajikan pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.3 Kegiatan dan Uraian Subkegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa

No	Kegiatan	Subkegiatan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah h. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN j. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD k. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	l. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD m. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	n. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	o. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	p. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor q. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan r. Fasilitasi Kunjungan Tamu s. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	t. Penyediaan Jasa Surat Menyurat u. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik v. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	w. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan

No	Kegiatan	Subkegiatan
		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan x. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	y. Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
10	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	z. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil aa. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil
11	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	bb. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
12	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	cc. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
13	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dd. Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
14	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	ee. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil ff. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
15	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	gg. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
16	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	hh. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota ii. Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota jj. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Subkegiatan
17	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	kk. Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota ll. Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota mm. Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
18	Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin di wilayah kabupaten/kota	nn. Perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin di wilayah kabupaten/kota yang ditangani
19	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	oo. Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
20	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	pp. Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
21	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	qq. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota rr. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Subkegiatan adalah bagian dari kegiatan yang lebih spesifik dan terperinci, yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu program. Uraian operasional subkegiatan pada dasarnya linier/searah dengan uraian operasional kegiatan sebagaimana rincian pada Tabel 4.1. Subkegiatan yang diampuh oleh Dinas Kelautan dan Perikanan pada Tabel 4.2 di atas merupakan subkegiatan sebagai pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan serta subkegiatan sebagai pelaksanaan urusan penunjang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa.

Uraian operasional subkegiatan yang telah disajikan pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

1. Nama Subkegiatan

Nama subkegiatan mencakup seluruh jenis subkegiatan yang telah dipetakan pada Tabel 4.2 yang akan dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 - 2029, baik yang merupakan subkegiatan sebagai pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan maupun subkegiatan sebagai pelaksanaan urusan Kelautan dan perikanan.

2. Lokasi Subkegiatan

Subkegiatan pada program urusan penunjang pemerintahan dilaksanakan pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Sedangkan Subkegiatan sebagai urusan pemerintahan wajib dilaksanakan pada seluruh wilayah dan entitas Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

3. Waktu Pelaksanaan

Semua subkegiatan secara rutin dilaksanakan pada setiap tahun, yaitu tahun 2025-2029.

4. Pihak yang Terlibat

Pelaksanaan subkegiatan pada program urusan penunjang pemerintahan dilaksanakan oleh semua bidang/unit pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa. Sementara itu, pelaksanaan Subkegiatan Urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan melibatkan berbagai pihak seperti : Pemerintah Pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Pemerintah Provinsi NTB, Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, Perguruan tinggi, NGO serta pihak Swasta.

5. Manfaat Subkegiatan

Pelaksanaan berbagai subkegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik meliputi peningkatan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penggunaan anggaran serta pencapaian tujuan perangkat daerah.
- b. Mendukung tata kelola administrasi keuangan perangkat daerah yang baik dalam memastikan pengelolaan keuangan sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Tata kelola BMD yang tertib, transparan, dan efisien.
- d. Menjamin tertib administrasi dalam membantu mempercepat proses pelayanan, baik internal maupun eksternal perangkat daerah dan analisis pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.
- e. Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- f. Terjaganya fungsi dan kinerja BMD
- g. Peningkatan Retribusi Daerah
- h. Menjaga ketersediaan stok ikan di perairan umum daratan guna menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, mendukung ketahanan pangan lokal, dan meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan tangkap perairan darat.
- i. Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan skala kecil melalui penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penangkapan Ikan
- j. Pengembangan kapasitas nelayan kecil dan kapasitas organisasi dan daya saing pembudidaya ikan kecil melalui pembentukan serta penguatan kelembagaan (kelompok, koperasi, atau forum), agar lebih mandiri, profesional, dan berkelanjutan dalam menjalankan usaha budidaya perikanan.
- k. Terbitnya perizinan berusaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi pelaku usaha pembudidayaan ikan dalam skala lokal, sekaligus mendukung pengelolaan usaha yang berkelanjutan, produktif, dan ramah lingkungan.
- l. Meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha Perikanan melalui Pengawasan Usaha Perikanan
- m. Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pesisir dan Perikanan, Peningkatan Daya Saing Produk Lokal Serta Pemberdayaan Perempuan dan Kelompok Rumah Tangga Perikanan.

- n. Meningkatkan Konsumsi Ikan Masyarakat Kampanye makan ikan, demo masak, dan sosialisasi gizi membantu mengubah perilaku konsumsi masyarakat menjadi lebih sehat dengan memperbanyak konsumsi protein ikan
- o. Memberikan legalitas usaha dan dasar untuk memperoleh izin lanjutan (PIRT, Halal, NIB) serta Membantu Unit Pengolahan Ikan kecil menembus pasar modern dan ekspor.

6. Teknis Pelaksanaan Subkegiatan

Pelaksanaan subkegiatan baik urusan penunjang pemerintahan daerah maupun Urusan pemerintahan bidang kelautan dan Perikanan dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dan/atau dapat dilakukan dengan partisipasi atau kolaborasi institusi/pihak lainnya sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

Tabel 4.4 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			REALISASI	ANGGARAN	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				18.308.718.881		13.070.676.514		13.626.095.565		15.273.879.134		17.242.822.418		19.590.415.088		22.410.255.957
X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemda Kab/Kota	Indeks Profesionalitas ASN PD	Poin	75,09	11.350.000	76	13.000.000	76,5	15.225.449	77	14.678.390	77,5	15.740.615	78	16.917.622	78,5	18.253.883
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian PD (Dokumen)	Dokumen	1	11.350.000	1	13.000.000	1	15.225.449	1	14.678.390	1	15.740.615	1	16.917.622	1	18.253.883
X.XX.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Dokumen	1	11.350.000	1	13.000.000	1	15.225.449	1	14.678.390	1	15.740.615	1	16.917.622	1	18.253.883
X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemda Kab/Kota	Peningkatan Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	Nilai	83,29	7.070.362.050	84,6	8.419.525.145	85	8.770.780.075	85,5	9.381.225.638	86	10.060.024.915	86,5	10.812.191.331	87	11.666.167.389
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Panganggaran Dinas Kelautan dan Perikanan	Dokumen	12	123.385.998	12	57.076.000	12	165.587.742	12	171.737.149	12	184.165.172	12	197.936.157	12	213.570.413
X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	Dokumen	2	87.292.198	2	32.891.000	2	35.619.164	2	36.941.947	2	39.615.307	2	42.577.550	2	45.940.595
X.XX.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	1	2.000.000	1	1.659.600	1	3.074.654	1	3.188.840	1	3.419.610	1	3.675.306	1	3.965.610

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			REALISASI	ANGGARAN	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
X.XX.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen	1	2.000.000	1	1.350.600	1	2.748.411	1	2.850.478	1	3.056.757	1	3.285.326	1	3.544.822
X.XX.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen	1	2.350.000	1	2.030.600	1	3.466.358	1	3.595.087	1	3.855.250	1	4.143.530	1	4.470.810
X.XX.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dokumen	1	2.675.000	1	1.680.600	1	3.096.826	1	3.211.832	1	3.444.260	1	3.701.806	1	3.994.198
X.XX.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	3.295.000	2	2.193.000	2	3.749.313	2	3.888.550	2	4.169.950	2	4.481.760	2	4.835.757
X.XX.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	Laporan	4	23.773.800	4	15.270.600	4	26.929.332	4	27.929.402	4	29.950.556	4	32.190.114	4	34.732.694
X.XX.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup PD	Data	-	-	-	-	4	86.903.684	4	90.131.013	4	96.653.482	4	103.880.765	4	112.085.927

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			REALISASI	ANGGARAN	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan PD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan	Dokumen	29	6.187.074.942	25	6.919.048.015	25	7.043.375.422	25	7.532.388.189	25	8.077.481.080	25	8.681.476.111	25	9.367.194.383
X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	58	6.094.351.222	58	6.834.051.595	58	6.959.442.798	58	7.442.628.229	58	7.981.225.500	58	8.578.023.004	58	9.255.569.892
X.XX.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	88.959.200	12	81.914.500	12	80.678.721	12	86.280.143	12	92.523.940	12	99.442.433	12	107.297.029
X.XX.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	3.001.920	1	3.081.920	1	3.253.903	1	3.479.817	1	3.731.640	1	4.010.674	1	4.327.462
X.XX.01.2.03 Administrasi BMD pada PD	Jumlah Dokumen Administrasi BMD pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang disusun	Dokumen	3	2.616.800	3	18.456.000	3	21.499.487	3	21.922.741	3	23.509.214	3	25.267.119	3	27.262.877
X.XX.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan BMD SKPD	Dokumen	1	996.000	1	17.086.000	1	19.053.036	1	20.375.864	1	21.850.395	1	23.484.262	1	25.339.199
X.XX.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	Laporan	2	1.620.800,00	2	1.370.000	2	2.446.451	2	1.546.877	2	1.658.819	2	1.782.857	2	1.923.678

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			REALISASI	ANGGARAN	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum PD	Jumlah Dokumen Administrasi Umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan	Dokumen	7	279.527.431	7	258.022.500	7	392.972.820	7	420.256.431	7	450.668.936	7	484.367.785	7	522.626.236
X.XX.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	49.506.400	1	94.437.500	1	119.899.721	1	128.224.209	1	137.503.351	1	147.785.188	1	159.458.203
X.XX.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Dokumen	4	26.940.000	4	9.345.000	4	11.978.094	4	12.809.718	4	13.736.713	4	14.763.879	4	15.930.024
X.XX.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	11.700.000	1	11.700.000	1	12.352.905	1	13.210.551	1	14.166.553	1	15.225.860	1	16.428.495
X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	191.381.031	1	142.540.000	1	248.742.100	1	266.011.953	1	285.262.319	1	306.592.858	1	330.809.514
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang disusun	Dokumen	3	189.703.301	3	195.570.500	3	205.196.000	3	219.442.502	3	235.322.797	3	252.919.100	3	272.896.260
X.XX.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	15.044.500	1	18.945.500	1	18.714.651	1	20.013.985	1	21.462.328	1	23.067.178	1	24.889.170
X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	170.240.801	1	172.525.000	1	182.152.553	1	194.799.178	1	208.896.121	1	224.516.364	1	242.250.096

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			REALISASI	ANGGARAN	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	4.418.000	1	4.100.000	1	4.328.796	1	4.629.339	1	4.964.348	1	5.335.558	1	5.756.994
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	Dokumen	56	288.053.578	56	971.352.130	56	942.148.604	56	1.015.478.626	56	1.088.877.716	56	1.170.225.059	56	1.262.617.220
X.XX.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	44	224.947.778	44	345.736.050	44	365.029.440	44	390.372.979	44	418.622.922	44	449.925.523	44	485.463.506
X.XX.01.2.09.0010 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	12	63.105.800	12	625.616.080	12	577.119.164	12	625.105.647	12	670.254.794	12	720.299.536	12	777.153.714
X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemda Kab/Kota	Laju Realisasi Retribusi Daerah Sektor Perikanan	%	1,50	5.426.920	-	-	2,25	7.500.000	2,5	8.123.612	2,75	8.799.077	3	9.530.705	3,25	10.323.167
3.25.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD yang disusun	Dokumen	12	5.426.920	-	-	12	7.500.000	12	8.123.612	12	8.799.077	12	9.530.705	12	10.323.167
3.25.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	12	5.426.920	-	-	12	7.500.000	12	8.123.612	12	8.799.077	12	9.530.705	12	10.323.167
3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Laju Produksi Perikanan Tangkap	%	2,80	4.434.201.541	2,4	2.322.322.680	2,5	2.279.744.993	2,6	2.782.817.491	2,7	3.410.658.114	2,8	4.194.408.892	2,9	5.172.994.865

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			REALISASI	ANGGARAN	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap di perairan umum (unit)	Unit	24	161.184.000	24	150.570.000	24	151.332.501	24	184.727.121	24	226.404.016	24	278.430.433	24	343.390.270
3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	24	161.184.000	24	150.570.000	24	151.332.501	24	184.727.121	24	226.404.016	24	278.430.433	24	343.390.270
3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan kecil yang terbina (Orang)	Orang	497	4.224.045.541	500	1.999.527.680	500	1.959.432.047	500	2.391.820.923	500	2.931.447.523	500	3.605.078.300	500	4.446.169.178
3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	50	4.223.016.541	50	1.993.067.680	50	8.435.747	50	10.297.268	50	12.620.469	50	15.520.585	50	19.141.650
3.25.03.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha	447	1.029.000	500	6.460.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.25.03.2.02.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit	-	-	-	-	1.950.996.300	500	2.381.523.655	500	2.918.827.054	500	3.589.557.715	500	4.427.027.528	
3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang terkelola (unit)	Unit	4	37.234.000	6	157.135.000	6	152.900.428	6	186.641.043	6	228.749.744	6	281.315.197	6	346.948.070
3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan	Layanan	3	37.234.000	2	157.135.000	2	152.900.428	2	186.641.043	2	228.749.744	2	281.315.197	2	346.948.070

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			REALISASI	ANGGARAN	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)															
3.25.03.2.04 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) (Rekomendasi)	Rekomendasi	121	11.738.000	150	15.090.000	150	16.080.017	150	19.628.404	150	24.056.831	150	29.584.962	150	36.487.347
3.25.03.2.04.0002 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Rekomendasi	121	11.738.000	150	15.090.000	150	16.080.017	150	19.628.404	150	24.056.831	150	29.584.962	150	36.487.347
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Laju Produksi Perikanan Budidaya	%	1,2	4.846.235.747	1,9	2.067.518.500	1,94	2.253.207.048	1,97	2.697.750.253	2	3.248.366.759	2,03	3.930.815.516	2,06	4.777.181.306
3.25.04.2.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi sertifikat Standar yang terbit	Rekomendasi	0	15.536.000	5	18.806.500	5	20.043.953	5	23.998.496	5	28.896.639	5	34.967.529	5	42.496.582

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			REALISASI	ANGGARAN	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
3.25.04.2.01.0002 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	Rekomendasi	0	15.536.000	5	18.806.500	5	20.043.953	5	23.998.496	5	28.896.639	5	34.967.529	5	42.496.582
3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil laki-laki dan perempuan yang memperoleh pemberdayaan (kelompok)	Kelompok	55	47.913.000	30	12.585.000	30	15.449.658	30	18.497.775	30	22.273.210	30	26.952.585	30	32.755.896
3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kelompok	5	4.244.000	5	3.700.000	5	4.877.452	5	5.839.741	5	7.031.645	5	8.508.922	5	10.341.025
3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	50	43.669.000	25	8.885.000	25	10.572.206	25	12.658.034	25	15.241.565	25	18.443.663	25	22.414.871

[illegible]

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			REALISASI	ANGGARAN	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
3.25.04.2.04.0008 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	-	10	5.577.695	10	6.678.139	10	8.041.161	10	9.730.527	10	11.825.661
3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	608	4.001.996.558	75	961.642.000	70	1.033.635.869	70	1.237.565.553	70	1.490.155.289	70	1.803.221.731	70	2.191.483.449
3.25.05. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Cakupan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang terawasi Berdasarkan Kewenangan Kabupaten	%	56	44.940.000	74	37.620.000	75	84.320.000	75	126.480.000	75	177.072.000	75	230.193.600	75	276.232.320
3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perikanan yang diperiksa sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	56	44.940.000	74	37.620.000	75	84.320.000	75	126.480.000	75	177.072.000	75	230.193.600	75	276.232.320
3.25.05.2.01.0004 Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	5	22.254.000,00	20	19.675.000	20	29.760.000	20	44.640.000	20	62.496.000	20	81.244.800	20	97.493.760

[illegible]

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			REALISASI	ANGGARAN	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
3.25.06.2.01.0003 Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rekomendasi	-	-	-	-	2	16.335.000	2	19.937.484	2	24.440.590	2	30.069.472	2	37.105.574
3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	6	12.664.000	5	15.505.000	5	21.135.000	5	25.796.066	5	31.622.398	5	38.905.313	5	48.008.956
3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	6	12.664.000	5	15.505.000	5	21.135.000	5	25.796.066	5	31.622.398	5	38.905.313	5	48.008.956
3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah angka konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Kg/Kapita/Tahun	54	1.865.672.623	55	175.700.189	56	177.848.000	57	217.070.200	58	266.097.950	59	327.382.637	60	403.988.497

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			REALISASI	ANGGARAN	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU
3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	51.135	124.628.500	52.161	15.725.000	54.118	16.075.000	55.946	19.620.145	57.639	24.051.575	59.332	29.590.864	61.025	36.514.974
3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	230	1.741.044.123	2	159.975.189	3	161.773.000	3	197.450.055	3	242.046.375	3	297.791.773	3	367.473.523
TOTAL				18.308.718.881		13.070.676.514		13.626.095.565		15.273.879.134		17.242.822.418		19.590.415.088		22.410.255.957

Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029, yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa adalah pengelolaan perikanan produktif. Program prioritas tersebut diintegrasikan ke dalam Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.

Program Prioritas Pembangunan Daerah beserta kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tanggung jawab dengan Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.5 Uraian kegiatan dan Sub Kegiatan dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ sub kegiatan	Ket
	Pengelolaan Perikanan Produktif	Meningkatnya Produksi Perikanan Budi Daya	3.25.04.2.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.04.2.01.0002 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	
			3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
			3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
			3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
			3.25.04.2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.04.2.03.0002 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
			3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.04.2.04.0008 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ sub kegiatan	Ket
		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
			3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
			3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
			3.25.03.2.02.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
			3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
			3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
			3.25.03.2.04 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.03.2.04.0002 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	

4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator terseleksi. Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang penetapannya ditujukan: (1) untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan (2) untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Indikator kinerja dan target kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa yang menjadi fokus layanan urusan pilihan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa ditampilkan dalam Tabel 4.5 berikut ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN PD	Kategori	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	
2	Kategori AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	Kategori	A	A	A	A	A	A	A	
3	Proporsi retribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap retribusi daerah	%	3,13	0,32	0,31	0,28	0,25	0,23	0,20	
4	Laju Peningkatan Produksi Perikanan	%	-	2	2,06	2,11	2,15	2,2	2,24	
5	Persentase pelaku usaha yang dinilai patuh terhadap regulasi (berdasarkan hasil audit/monitoring)	%	-	75	75	75	75	75	75	

4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang ditetapkan secara nasional untuk menilai aspek pada tataran pengambil kebijakan daerah dan tataran pelaksana kebijakan daerah untuk masing-masing urusan pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kinerja Dinas dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. IKK ini mencakup berbagai aspek, mulai dari produksi perikanan, pendapatan nelayan, pengelolaan sumber daya perikanan, hingga aspek administratif dan kelembagaan dinas. Fungsi Indikator Kinerja Kunci (IKK) ini antara lain Mengukur Keberhasilan Program, menjadi dasar evaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan, serta menunjukkan capaian Target kinerja. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kelautan dan Perikanan disajikan dalam Tabel 4.7 Berikut ini:

Tabel. 4.7 Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	IP-ASN Dinas Kelautan dan Perikanan	Poin	75,09	76,00	76,50	77,00	77,50	78,00	78,50
2	Nilai AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	Poin	83,29	84,6	85	85,5	86	86,5	87
3	Laju Realisasi Retribusi Daerah Sektor Perikanan	%	1,50	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25
4	Laju Produksi Perikanan Tangkap	%	2,8	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9
5	Laju Produksi Perikanan Budidaya	%	1,20	1,90	1,94	1,97	2,00	2,03	2,06
6	Cakupan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang terawasi Berdasarkan Kewenangan Kabupaten	%	56,00	74,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
7	Laju Produksi Olahan Hasil Perikanan	%	7,40	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50

Renstra-PD Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat arah pembangunan jangka menengah perangkat daerah, dan merupakan turunan langsung dari RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025–2029. Penyusunan Renstra-PD ini dilaksanakan dengan memperhatikan sejumlah kaidah strategis sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan Penting Substansial

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan teknis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran, yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dalam bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Sumbawa. Dengan demikian Renstra merupakan kerangka landasan bagi penyusunan arah, kebijakan dan strategis implementasi APBD serta memberikan arah kejelasan kinerja Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa (Renja dan RKA) setiap tahunnya sesuai periode Renstra, dengan mengacu kepada RKPD Kabupaten Sumbawa. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan-perubahan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa maka Renstra dapat ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian. Terlaksananya apa yang telah direncanakan diharapkan akan terbangun tata kelola anggaran yang akuntabel, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang optimal serta terselenggaranya pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat dan akurat.

5.2 Kaidah Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi

Kaedah Pelaksanaan RENSTRA (Rencana Strategis) adalah pedoman atau aturan yang digunakan untuk memastikan pelaksanaan rencana strategis berjalan sesuai tujuan, tepat sasaran, dan dapat diukur hasilnya. Dalam konteks pemerintahan atau organisasi, RENSTRA merupakan dokumen penting yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan selama periode waktu tertentu (5 tahun).

Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah agar tercipta koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan. Selain itu agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kaidah Pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 Sebagai Berikut:

1. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan disusun dan selaras dengan Tujuan dari RPJMN dan RPJMD Kab. Sumbawa.
2. Penjabaran lebih lanjut Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 untuk setiap tahunnya disusun melalui Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sumbawa.
3. Renja-Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kelautan dan Perikanan.

4. Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan harus selaras dan bertujuan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini.
5. Renstra ini bersifat dinamis. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan kebijakan nasional atau daerah yang bersifat strategis, maka dapat dilakukan perubahan terhadap dokumen Renstra ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

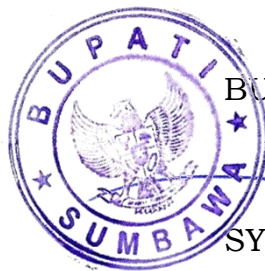
Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, Kepala Dinas melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa secara berkala, baik jangka waktu triwulan, semesteran, maupun tahunan, serta melaporkan hasil pengendalian dan evaluasinya kepada Bupati Sumbawa.

5.3 Kaidah Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sumbawa, serta mengisi kekosongan Renja setelah periode Renstra ini berakhir sebagai dampak periode RPJMD berakhir, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Renja masa transisi.
2. Renstra sebagai pedoman dimaksud pada butir (1) bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode Renstra dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama periode perencanaan masa pemerintahan baru.

Dengan memperhatikan kaidah-kaidah tersebut, Renstra-PD Tahun 2025-2029 ini diharapkan mampu menjadi dokumen perencanaan yang efektif, responsif, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah. Melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang tersusun secara sistematis, diharapkan akan tercapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan. Selanjutnya, pelaksanaan Renstra-PD ini akan mendorong terbentuknya tata kelola anggaran yang lebih akuntabel, transparan, dan berbasis hasil, serta memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih akurat sesuai dengan kewenangan perangkat daerah.



BUPATI SUMBAWA,

SYARAFUDDIN JAROT